

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA SELATAN



# 2009



KERJASAMA  
BPS PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN  
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN



INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN  
2009

<http://www.sumsel.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan  
2010

INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN  
2009

Katalog BPS: 4103.16  
Nomor Publikasi: 16522.10.02

Penulis:  
Faharuddin, M.Si.

Editor:  
M. Haslani Haris, M.A.  
Dyah Anugrah K., M.A.

Diterbitkan Oleh:  
Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan

Dicetak Oleh:  
CV Kreasi Rifi

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 adalah merupakan publikasi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data utamanya para perencana pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah. Keterangan yang dikumpulkan menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi penduduk, antara lain mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumahtangga, perumahan dan sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari pembaca sangatlah kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para konsumen data.

Palembang, Oktober 2010  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
SUMATERA SELATAN

M. HASLANI HARIS, MA  
NIP. 19520902 197409 1 001



<http://www.sumsel.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	4
1.3. Ruang Lingkup .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>II. METODOLOGI</b>	
2.1. Sumber Data .....	7
2.2. Konsep dan Definisi .....	7
2.2.1. Kependudukan .....	7
2.2.2. Kesehatan .....	9
2.2.3. Pendidikan .....	11
2.2.4. Ketenagakerjaan .....	13
2.2.5. Taraf dan Pola Konsumsi .....	15
2.2.6. Perumahan dan Sanitasi .....	17
<b>III. GAMBARAN UMUM TINGKAT KESEJAHTERAAN</b>	
3.1. Kemiskinan .....	19
3.2. Pembangunan MAnusia .....	25
<b>IV. KEPENDUDUKAN</b>	
4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	31
4.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	35
4.3. Fertilitas .....	41

<b>V. KESEHATAN</b>	
5.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	45
5.2. Pemberian ASI dan Imunisasi .....	49
5.3. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan .....	55
<b>VI. PENDIDIKAN</b>	
6.1. Angka Melek Huruf .....	67
6.2. Rata-rata Lama Sekolah .....	70
6.3. Tingkat Pendidikan .....	72
6.4. Partisipasi Sekolah .....	75
6.5. Fasilitas Pendidikan .....	79
<b>VII. KETENAGAKERJAAN</b>	
7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	83
7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	85
7.3. Lapangan Usaha Utama .....	90
7.4. Status Pekerjaan .....	94
7.5. Jumlah Jam Kerja .....	97
<b>VIII. TARAF DAN POLA KONSUMSI</b>	
8.1. Perkembangan Penduduk Miskin .....	101
8.2. Taraf Konsumsi Energi dan Protein .....	104
8.3. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan .....	105
8.4. Perkembangan Distribusi Pendapatan .....	106
8.5. Pengeluaran Rumahtangga .....	109
<b>IX. PERUMAHAN DAN SANITASI</b>	
9.1. Kualitas Rumah Tinggal .....	113
9.2. Fasilitas Rumah Tinggal .....	118

X. ASPEK SOSIAL LAINNYA

10.1. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	123
10.2. Sosial Ekonomi Rumah tangga Lainnya .....	126

<http://www.sumsel.bps.go.id>

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>
<b>Gambaran Umum</b>	
Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 – 2009	24
Tabel 3.2 IPM dan Komponen, Provinsi Sumatera Selatan 2004 – 2009	27
Tabel 3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002 – 2009	29
<b>Kependudukan</b>	
Tabel 4.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2009	33
Tabel 4.2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	34
Tabel 4.3 Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009	36
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 1980-2009	37
Tabel 4.5 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 2009	40
Tabel 4.6 Beberapa Indikator Fertilitas Sumatera Selatan	42

Tabel 4.7	Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1995, 2000, 2005, 2008 dan 2009	43
Tabel 4.8	Persentase Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama 2009	44

### Kesehatan

Tabel 5.1	Angka Kematian Bayi dan Anak serta Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan	46
Tabel 5.2	Angka Kesakitan Dan Rata-Rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2007-2009	48
Tabel 5.3	Rata-Rata Lama(Bulan) Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI dan ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/ Kota 2007-2009	50
Tabel 5.4	Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/Kota, 2007 - 2009	51
Tabel 5.5	Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi, 2007-2009	52
Tabel 5.6	Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2009	53
Tabel 5.7	Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten/Kota, 2007 - 2009	54
Tabel 5.8	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2006 – 2009	55



Tabel 5.9	Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan, 2006 – 2009	57
Tabel 5.10	Persentase Bayi Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan, 2009	60
Tabel 5.11	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2007 – 2009	61
Tabel 5.12	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2009	63
Tabel 5.13	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2007 – 2009	64
Tabel 5.14	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, 2009	65
<b>Pendidikan</b>		
Tabel 6.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2007 – 2009	68
Tabel 6.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009	69
Tabel 6.3	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2007 – 2009	71
Tabel 6.4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009	72
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2009	74

Tabel 6.6	Angka Partispasi Sekolah Menurut Umur, 2007 – 2009	75
Tabel 6.7	Angka Partispasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2009	77
Tabel 6.8	Angka Partispasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, 2007 – 2009	78
Tabel 6.9	Angka Partispasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2007 – 2009	79
Tabel 6.10	Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Siswa, Rasio Siswa-Sekolah dan Rasio Siswa-Guru Menurut Jenjang Pendidikan , 2006/2007 – 2009/2010	81
<b>Ketenagakerjaan</b>		
Tabel 7.1	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009	84
Tabel 7.2	Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009	85
Tabel 7.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009	87
Tabel 7.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009	88
Tabel 7.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan, 2007 – 2009	89
Tabel 7.6	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2007 - 2008	91

Tabel 7.7	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Utama, 2009	93
Tabel 7.8	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2007 – 2009	94
Tabel 7.9	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2009	96
Tabel 7.10	Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009	97
Tabel 7.11	Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009	98
<b>Taraf dan Pola Konsumsi</b>		
Tabel 8.1	Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator, 2007 – 2009	103
Tabel 8.2	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009	105
Tabel 8.3	Beberapa Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009	106
Tabel 8.4	Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009	108
Tabel 8.5	Persentase Pengeluaran Per Kapita	110

Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun  
2007 – 2009

**Perumahan dan Sanitasi**

Tabel 9.1	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2007 – 2009	114
Tabel 9.2.	Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2009	117
Tabel 9.3	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2007 – 2009	119
Tabel 9.4	Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2009	122

**Aspek Sosial Lainnya**

Tabel 10.1	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2007 – 2009	124
Tabel 10.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2009	126
Tabel 10.3	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2007 – 2009	127
Tabel 10.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2009	129

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>
Gambar 3.1 Jumlah (Dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1999 – 2009	22
Gambar 3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 – 2009	28
Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1971 – 2009	32
Gambar 4.2. Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan 1980 – 2009	38
Gambar 5.1. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan 1971 – 2007	47
Gambar 5.2. Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Puskesmas dan Pustu 2005 - 2009	56
Gambar 5.3. Persentase Bayi menurut Penolong Persalinan Provinis Sumatera Selatan 2007 – 2009	58
Gambar 6.1 Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009	70
Gambar 6.2. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2007 – 2009	73

Gambar 7.1.	TPT Menurut Pendidikan 2007 – 2009	90
Gambar 7.2.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama 2007 -2009	92
Gambar 8.1	Gini Ratio Menurut Daerah, 2007 – 2009	111
Gambar 9.1	Persentase Rumahtangga Menurut Klasifikasi Daerah dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan	116
Gambar 9.2	Persentase Rumahtangga Menurut Klasifikasi Daerah dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan	121

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terciptanya kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama berdirinya negara RI. Yang dimaksud sejahtera adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun nonfisik. Sehubungan dengan usaha penciptaan kesejahteraan rakyat tersebut, pemerintah telah menetapkan agenda *Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera* sebagai salah satu dari tiga agenda utama pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009. Agenda ini secara nasional diarahkan pada pencapaian lima sasaran pokok yaitu: (1) pengurangan kemiskinan dan pengangguran; (2) berkurangnya kesenjangan antar wilayah; (3) meningkatnya kualitas manusia, (4) membaiknya mutu lingkungan hidup, dan (5) meningkatnya dukungan infrastruktur.

Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan itu merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan

publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, konsen Pemerintah Provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat tercermin melalui visi Pemerintah Provinsi yaitu **"Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya"**. Visi tersebut terjabarkan dalam 10 misi utama, di antaranya adalah **"Mengembangkan dan membina serta memfasilitasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal dan informal"** serta **"Meningkatkan dan meratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat"**.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Sumatera Selatan tersebut yaitu untuk mewujudkan Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya berbagai program pembangunan sudah dilaksanakan. Program-program pembangunan tersebut tentu saja telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa diantaranya berjalan cukup lambat dan masih menyisakan tugas yang berat untuk mencapai target khususnya dikaitkan dengan tujuan pembangunan milenium (MGDs).

Salah satu tugas Pemerintah Daerah yang cukup berat adalah menurunkan angka kemiskinan untuk mencapai target MGDs Nasional sebesar 7,5 persen pada tahun 2015.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1999 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 23,87 persen. Angka kemiskinan cenderung menurun dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2004 – 2006 terjadi perubahan yang relatif kecil. Mulai tahun 2007, angka kemiskinan di Sumatera Selatan konsisten menurun berturut-turut dari 20,99 persen tahun 2006, 19,15 persen tahun 2007, 17,67 persen tahun 2008 dan 15,68 persen tahun 2009. Meskipun demikian, pencapaian angka kemiskinan Sumatera Selatan masih jauh dibandingkan target MDGs Nasional pada tahun 2015 yaitu 7,5 persen.

Tugas Pemerintah Daerah lainnya adalah bagaimana mencapai pendidikan dasar bagi semua. Sesuai target pembangunan milenium pada tahun 2015 diharapkan semua anak perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SLTP. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni jenjang pendidikan SD di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai angka yang cukup besar yaitu 92,81 persen. Namun demikian, untuk jenjang pendidikan SLTP, pencapaian partisipasi sekolah masih jauh dari target MDGs karena angka partisipasi murni baru mencapai 52,84 persen.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai selama ini di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang akan memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, kemiskinan, perumahan dan

lingkungan serta aspek sosial lainnya. Informasi tersebut selain sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan selama ini di Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai bahan masukan penetapan kebijakan pembangunan Sumatera Selatan tahun-tahun mendatang.

## 1.2. Tujuan

Penyusunan buku 'Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan 2009' ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai potret dan perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat digunakan indikator dampak. Publikasi ini juga menyajikan indikator-indikator input, proses, dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk. Antara indikator input dan indikator dampak tidak selalu sejalan. Penjelasannya sederhana; input atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu kesenjangan antara input dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

### 1.3. Ruang Lingkup

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan perumahan. Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan dapat diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan mengenai aspek-aspek kesejahteraan rakyat dalam buku lebih sistematis, maka penulisan didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: METODOLOGI
BAB III	: TINJAUAN UMUM
BAB IV	: KEPENDUDUKAN
BAB V	: KESEHATAN

BAB VI	: PENDIDIKAN
BAB VII	: KETENAGAKERJAAN
BAB VIII	: TARAF DAN POLA KONSUMSI
BAB IX	: PERUMAHAN DAN SANITASI
BAB X	: ASPEK SOSIAL LAINNYA
BAB XI	: PENUTUP

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam buku ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Meskipun data Susenas dan Sakernas mencakup berbagai aspek kesejahteraan rakyat, beberapa indikator penunjang dapat diperoleh melalui sumber-sumber lain khususnya dari Sumatera Selatan Dalam Angka.

### 2.2. Konsep dan Definisi

Metode analisis yang digunakan pada penyusunan indikator-indikator dalam buku ini adalah dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

#### 2.2.1. Kependudukan

- a. **Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.

- b. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0(1+r)^t$$

$P_t$  adalah jumlah penduduk pada tahun  $t$

$P_0$  adalah penduduk pada tahun 0

$t$  adalah laju pertumbuhan penduduk

- c. **Tingkat Kepadatan** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kepadatan (jiwa/km}^2\text{)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah Yang Bersangkutan (km}^2\text{)}}$$

- d. **Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki - laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

- e. **Angka Beban Tanggungan (*Dependency Ratio*)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun/penduduk usia muda dan 65 tahun ke atas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia

produktif (15-64 tahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{\text{Penduduk Usia Tidak Produktif}}{\text{Penduduk Usia 15-64 Tahun}} \times 100$$

- f. **Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total** adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya.

#### 2.2.2. Kesehatan

- a. **Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah perbandingan antara jumlah bayi (0-1 tahun) yang meninggal dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Atau rata-rata banyaknya bayi yang meninggal setiap seribu kelahiran hidup. Rumus yang digunakan:

$$\text{AKB} = \frac{\text{Jumlah kematian usia 0 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 1000$$

- b. **Angka Harapan Hidup (AHH)** adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh oleh seseorang.
- c. **Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan atau Angka Kesakitan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan

kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu saat.

- d. **Rata-rata Lama Sakit** adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan.
- e. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia
- f. **Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis** adalah rasio banyaknya proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.
- g. **Mengobati sendiri** adalah upaya art yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- h. **Berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau

tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art.

### 2.2.3. Pendidikan

- a. **Bersekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.
- b. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Angka Melek Huruf} = \frac{\text{Penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf}}{\text{Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$$

- c. **Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. MYS dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

- d. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$APS_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang bersekolah}_i}{\text{Jumlah Penduduk}_i}$$

i = kelompok usia: 7-12, 13-15, 16-18

- e. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada pada jenjang tertentu (SD, SLTP atau SLTA) pada kelompok usia yang sesuai dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$APM_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang bersekolah usia bersesuaian}_i}{\text{Jumlah Penduduk usia bersesuaian}}$$

i = jenjang: SD (7-12), SLTP (13-15), SLTA (16-18)

- f. **Rasio Murid dan Sekolah** adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan/sekolah dengan jumlah sekolah pada pendidikan tersebut. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Murid dan Sekolah}_i = \frac{\text{Jumlah Murid}_i}{\text{Jumlah Sekolah}_i}$$

i = jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA)

- g. **Rasio Murid dan Guru** adalah perbandingan antara jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Murid dan Guru}_i = \frac{\text{Jumlah Murid}_i}{\text{Jumlah Guru}_i}$$

$i$  = jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA)

#### 2.2.4. Ketenagakerjaan

- a. **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- b. **Menganggur** adalah keadaan seseorang di mana selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan.

c. **Angkatan Kerja (AK)** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur.

d. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas). Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+)}} \times 100$$

e. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

f. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tapi belum mulai bekerja)

terhadap jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

- g. **Jumlah jam kerja** adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir.
- h. **Lapangan usaha/pekerjaan** ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
- i. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Buruh/karyawan/pegawai, Pekerja bebas dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

#### 2.2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- a. **Konsumsi/pengeluaran** (makanan maupun non makanan) adalah nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga baik berasal dari pembelian, produksi sendiri atau pemberian. Untuk konsumsi yang berasal

dari produksi sendiri atau pemberian, nilainya diperhitungkan sesuai dengan harga pasar setempat.

- b. **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran rumahtangga sebulan di bawah garis kemiskinan.
- c. **Garis Kemiskinan** adalah nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yaitu 2100 kkal/kapita/hari ditambah kebutuhan dasar non makanan khususnya untuk pangan dan papan.
- d. **Gini Ratio** adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan di mana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Rumus yang digunakan adalah:

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1}) \right|$$

$X_k$  adalah kumulatif proporsi penduduk

$$X_k = \frac{\sum_{m=1}^k X_m}{\sum X}$$

di mana  $k = 0, \dots, n$ ,  $X_0 = 0$ ,  $X_n = 1$ .

$Y_k$  adalah kumulatif proporsi pendapatan

$$Y_k = \frac{\sum_{m=1}^k Y_m}{\sum Y}$$

di mana  $k = 0, \dots, n$ ,  $Y_0 = 0$ ,  $Y_n = 1$ .

#### 2.2.6. Perumahan dan Sanitasi

- a. **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).
- b. **Atap layak** adalah atap selain daun-daunan yaitu Beton, Genteng, Sirap, Seng dan Asbes
- c. **Dinding Pemanen** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako (dinding tembok) dan dinding kayu
- d. **Air bersih** adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m.

- e. **Jamban Sehat** adalah jamban/kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden sendiri dengan kloset leher angsa serta dilengkapi tangki pembuangan (tangki septik).

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB III GAMBARAN UMUM TINGKAT KESEJAHTERAAN

### 3.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak hanya dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau

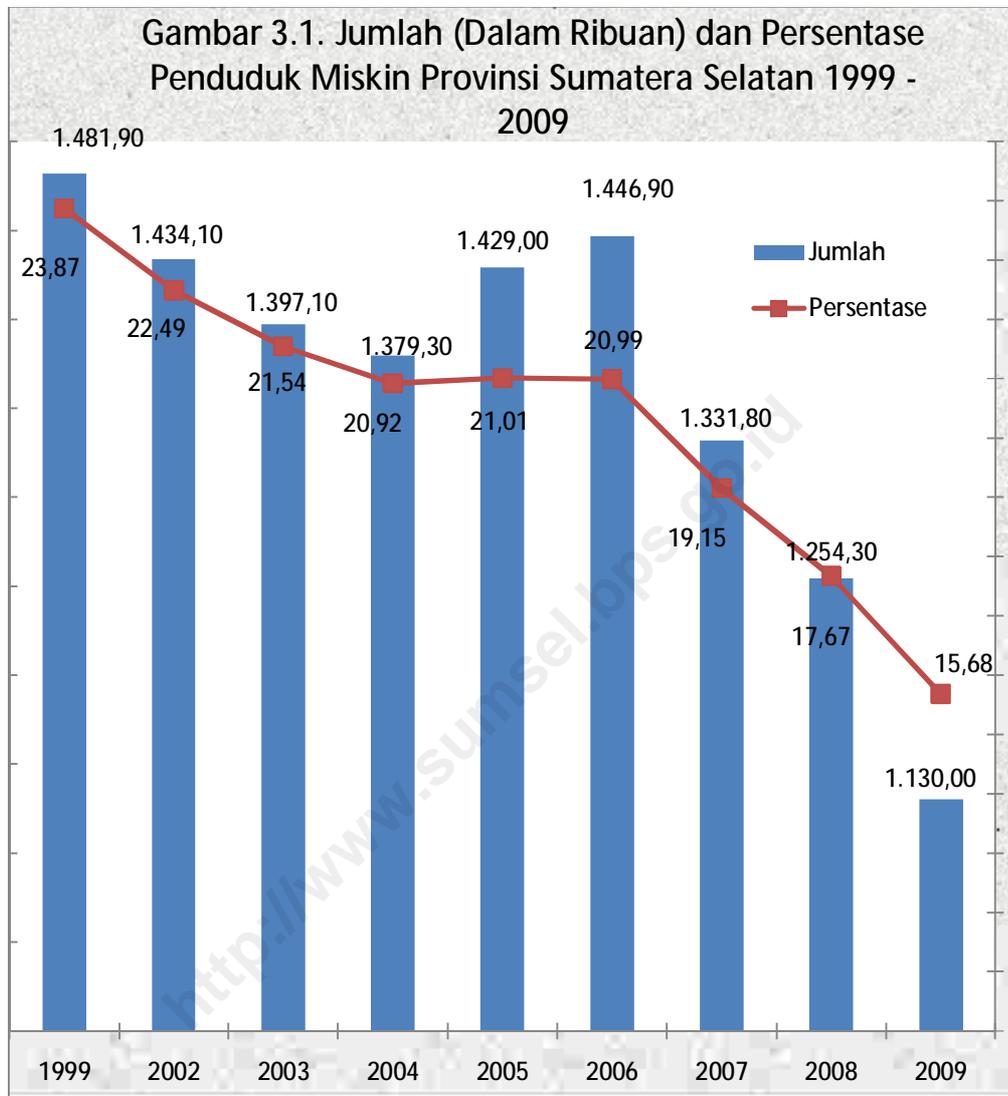
ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Ada tiga kebijakan yang saat ini mempengaruhi perhatian pemerintah daerah terhadap kemiskinan; (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengemban 'fungsi-fungsi wajib' termasuk untuk menyediakan layanan umum bagi masyarakat yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar, (2) gerakan nasional untuk mengembangkan dan melaksanakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) membutuhkan partisipasi dari pemerintah kabupaten/kota, (3) program-program bantuan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi kerentanan ekonomi yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu langkah pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh sejauh mana perhatian pemerintah kabupaten/kota itu sendiri misalnya dengan menciptakan desa-desa mandiri yang sejahtera untuk menjaga kelangsungan finansial mereka.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 167 menyatakan bahwa "Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatkan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaringan sosial. Dalam rangka SPK dibentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga memperoleh dana alokasi umum yang sebanding dengan tingkat kemiskinan di daerahnya. Berbagai subsidi juga telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi beban penduduk miskin. Dalam konteks regional kabupaten/kota beberapa program pemerintah kabupaten/kota secara langsung juga ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya.

Namun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan di daerah masih menghadapi kendala, khususnya untuk mengembangkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan lokal dan menyalurkan sumber daya secara efisien. Kelembagaan KPK sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di daerah dinilai masih lemah. Koordinasi lintas sektor masih merupakan masalah karena KPK sebagai lembaga baru tidak memiliki insentif finansial dan kewenangan yang memadai. Kondisi ini diperparah oleh karena anggaran untuk pengentasan kemiskinan di daerah masih mendapat porsi yang cukup kecil dari keseluruhan APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, program-program yang dibuat pemerintah dianggap tidak memenuhi sasaran karena keterbatasan kemampuan lembaga pemerintah daerah serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program pemerintah yang sedang dijalankan.



Dengan memperhatikan persoalan kemiskinan serta skala kemiskinan yang ada, beban dan tantangan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangatlah besar. Berdasarkan data, pada tahun tahun

2005 jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 1.429.000 jiwa. Angka ini masih cukup besar karena meliputi sekitar 21,01 persen dari seluruh penduduk Sumatera Selatan. Meskipun, dalam 4 tahun berikutnya angka kemiskinan memiliki trend yang menurun di mana pada tahun 2009 angka kemiskinan menjadi 1.130.000 jiwa atau sebesar 15,68 persen.

Memperbandingkan angka kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan, akan terlihat bahwa persentase penduduk miskin tertinggi tahun 2009 ditemui di Kabupaten Musi Banyuasin (22,76 persen), Kabupaten Musi Rawas (21,40 persen) dan Kabupaten Lahat (20,98 persen). Sedangkan persentase penduduk miskin terendah dijumpai di Kota Pagaralam (9,66 persen), OKU Timur (9,95 persen), OKU Selatan (12,73 persen) dan OKU (13,17 persen). Namun demikian secara absolute jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Selatan berada di Kota Palembang (211,8 ribu jiwa), disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin (118,9 ribu jiwa), Kabupaten Ogan Komering Ilir (122,7 ribu jiwa), Kabupaten Banyuasin (114,2 ribu jiwa) dan Kabupaten Musi Rawas (108 ribu jiwa).

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2003 – 2009

Kabupaten/Kota	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(01) Ogan Komering Ulu	195,7 (17,89)	201,4 (18,16)	45,2 (17,59)	46,1 (17,80)	40,6 (15,69)	38,6 (14,64)	35,1 (13,17)
(02) Ogan Komering Ilir	220,0 (22,43)	218,9 (22,02)	161,6 (24,47)	174,1 (25,93)	152,7 (22,50)	122,7 (17,67)	114,2 (16,17)
(03) Muara Enim	147,0 (24,18)	138,3 (22,34)	140,3 (22,03)	140,7 (21,88)	128,5 (19,87)	118,4 (17,98)	106,4 (15,96)
(04) Lahat	159,1 (30,08)	160,2 (29,61)	162,6 (29,57)	163,1 (29,67)	94,9 (28,09)	78,7 (23,21)	71,3 (20,98)
(05) Musi Rawas	165,1 (35,85)	164,0 (35,40)	166,4 (34,82)	166,9 (34,49)	160,3 (32,93)	120,7 (24,27)	108 (21,40)
(06) Musi Banyuasin	164,4 (37,20)	164,4 (36,39)	171,3 (36,28)	171,8 (35,52)	165,6 (33,60)	129,5 (25,45)	118,9 (22,76)
(07) Banyuasin	156,4 (22,80)	147,3 (20,86)	149,5 (20,22)	149,9 (19,81)	136,8 (17,72)	122,4 (15,38)	112,1 (13,72)
(08) OKU Selatan			58,8 (18,42)	67,8 (21,06)	61,2 (18,96)	47,7 (14,56)	42,1 (12,73)
(09) OKU Timur			102,8 (18,38)	103,1 (18,26)	90,7 (16,03)	69,6 (12,12)	57,7 (9,95)
(10) Ogan Ilir			85,5 (23,75)	82,7 (22,67)	79,6 (21,57)	67,1 (17,78)	60,1 (15,65)
(11) Empat Lawang					49,7 (23,50)	39,1 (18,37)	33,7 (15,80)
(71) Palembang	125,2 (9,75)	124,1 (9,57)	125,9 (9,35)	126,3 (9,23)	124,4 (8,98)	235,3 (16,66)	211,8 (14,75)
(72) Prabumulih	16,5 (13,29)	15,8 (12,41)	15,5 (11,83)	12,3 (9,33)	10,0 (7,57)	20,9 (15,39)	19,1 (13,93)
(73) Pagar Alam	18,1 (16,26)	16,9 (14,91)	15,2 (13,20)	13,7 (11,88)	11,2 (9,75)	11,8 (10,23)	11,2 (9,66)
(74) Lubuk Linggau	29,6 (17,80)	28,0 (16,42)	28,4 (16,11)	28,5 (16,01)	25,6 (14,25)	31,8 (17,36)	28,1 (15,12)
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>1.397,1 (21,54)</b>	<b>1.379,3 (20,92)</b>	<b>1.429,0 (21,01)</b>	<b>1.446,9 (20,99)</b>	<b>1.331,8 (19,15)</b>	<b>1.254,3 (17,67)</b>	<b>1.130,0 (15,68)</b>

Catatan :

1). Jumlah Penduduk Miskin dalam ribu jiwa

2). Angka dalam Kurung menunjukkan persentase

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

### 3.2. Pembangunan Manusia

*“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. “*

Kalimat di atas merupakan kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Kalimat ini dengan jelas menekankan pesan utama yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar

pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) dan suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

Dengan demikian IPM akan memberikan pengukuran yang menyeluruh terhadap pembangunan karena mencakup aspek kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Angka Harapan Hidup, aspek pendidikan yang diwakili oleh Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta aspek ekonomi yang diwakili oleh komponen daya beli (PPP). Perkembangan besaran IPM dari waktu ke waktu akan merupakan gambaran dari perkembangan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Tabel 3.2. di bawah ini memberikan perkembangan IPM dan komponennya di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2004 – 2009. Secara umum IPM mengalami trend yang meningkat selama periode tersebut yang tentu saja merupakan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Ogan Ilir selama periode tersebut. Peningkatan itu ternyata tercermin dari keempat komponen IPM tersebut di atas. Angka Harapan Hidup meningkat dari 67,7 tahun pada tahun 2004 menjadi 69,40 tahun pada tahun 2009, cerminan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan dalam periode tersebut. Aspek pendidikan yang diwakili oleh dua komponen yaitu Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah juga menunjukkan

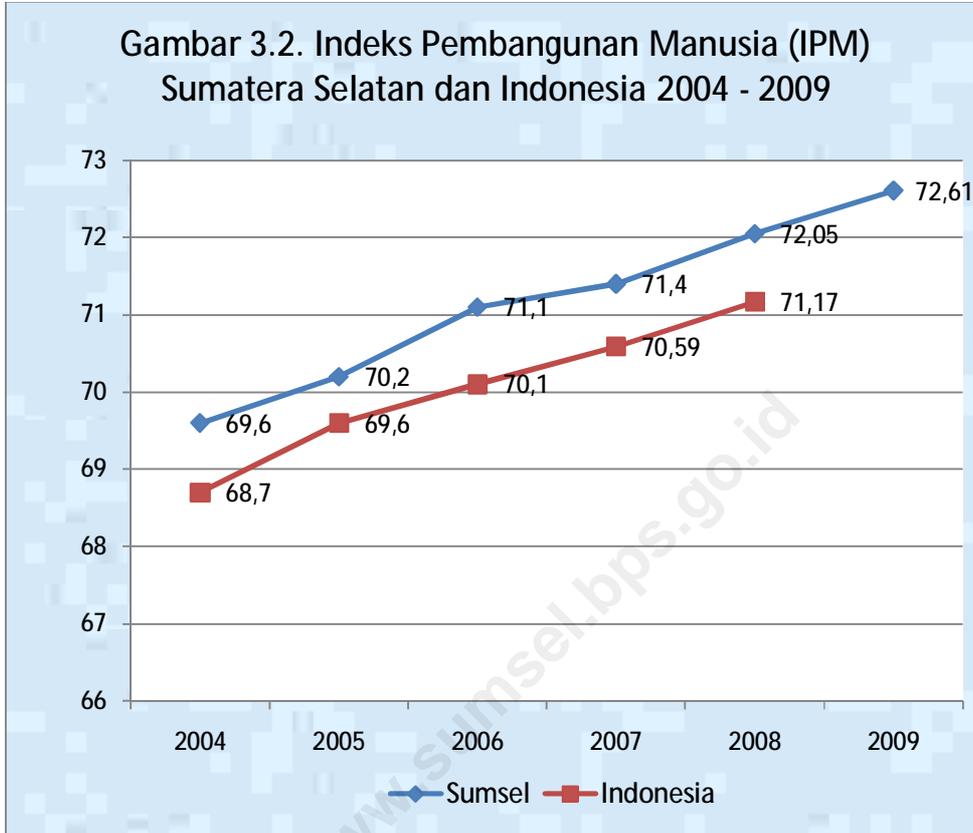
trend yang meningkat periode tersebut juga sebagai gambaran meningkatnya pendidikan masyarakat selama 2004 – 2009. Aspek yang terakhir merupakan aspek ekonomi yang memperlihatkan meningkatnya daya beli masyarakat Sumatera Selatan periode 2004 – 2009 tersebut.

**Tabel 3.2. IPM dan Komponen, Provinsi Sumatera Selatan 2004 - 2009**

<b>IPM dan Komponen</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>IPM</b>	<b>69,60</b>	<b>70,20</b>	<b>71,09</b>	<b>71,40</b>	<b>72,05</b>	<b>72,61</b>
<b>Angka Harapan Hidup</b>	<b>67,7</b>	<b>68,3</b>	<b>68,8</b>	<b>69,00</b>	<b>69,20</b>	<b>69,40</b>
<b>Angka Melek Huruf</b>	<b>95,70</b>	<b>95,90</b>	<b>96,59</b>	<b>96,66</b>	<b>97,05</b>	<b>97,21</b>
<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>	<b>7,40</b>	<b>7,50</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,66</b>
<b>PPP</b>	<b>608,40</b>	<b>610,30</b>	<b>625,30</b>	<b>617,59</b>	<b>623,49</b>	<b>628,30</b>

Sekalipun trend IPM menunjukkan peningkatan periode 2004 – 2009, nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan masih jauh dari nilai IPM maksimum yaitu 100. Pada tahun 2009, nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 72,61. Namun demikian, dibandingkan dengan capaian IPM Nasional, angka ini berada di atas (Pada tahun 2008, angka IPM Indonesia sebesar 71,4). Sedangkan dibandingkan dengan provinsi yang lain, IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah dengan peringkat 10 pada tahun 2009.

Gambar 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Selatan dan Indonesia 2004 - 2009



IPM tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai IPM sebesar 75,83, disusul oleh Kota Prabumulih dengan nilai IPM sebesar 73,69. Sedangkan IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas dengan nilai IPM sebesar 66,33, disusul oleh Kabupaten Empat Lawang dengan nilai IPM sebesar 68,15 (Tabel 3.3.).

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002 – 2009

Kabupaten/Kota	2002	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(01) Ogan Komering Ulu	66,6	69,3	69,9	70,9	71,40	71,92	72,36
(02) Ogan Komering Ilir	63,1	68,1	68,8	69,0	69,15	69,64	70,06
(03) Muara Enim	64,2	68,1	68,7	69,1	69,42	69,91	70,38
(04) Lahat	65,1	67,2	67,6	68,4	69,35	69,99	70,53
(05) Musi Rawas	62,0	64,4	65,0	65,6	66,31	66,77	67,33
(06) Musi Banyuasin	64,6	68,1	68,7	69,0	69,64	70,54	71,13
(07) Banyuasin		66,7	67,2	68,1	68,60	69,08	69,45
(08) OKU Selatan		67,9	68,8	70,0	70,28	70,66	71,02
(09) OKU Timur		65,1	65,4	67,5	68,14	68,88	69,39
(10) Ogan Ilir		65,6	66,0	67,2	68,17	68,67	69,17
(11) Empat Lawang				66,59	67,17	67,68	68,15
(71) Palembang	71,2	73,1	73,6	74,3	74,94	75,49	75,83
(72) Prabumulih		70,7	71,1	71,7	72,51	73,20	73,69
(73) Pagaram		69,5	69,9	71,1	71,70	72,16	72,48
(74) Lubuklinggau		65,8	66,3	68,0	69,24	69,69	70,18
Sumatera Selatan	66,0	68,7	69,6	71,1	71,40	72,05	72,61

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB IV

### KEPENDUDUKAN

Masalah kependudukan yang antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

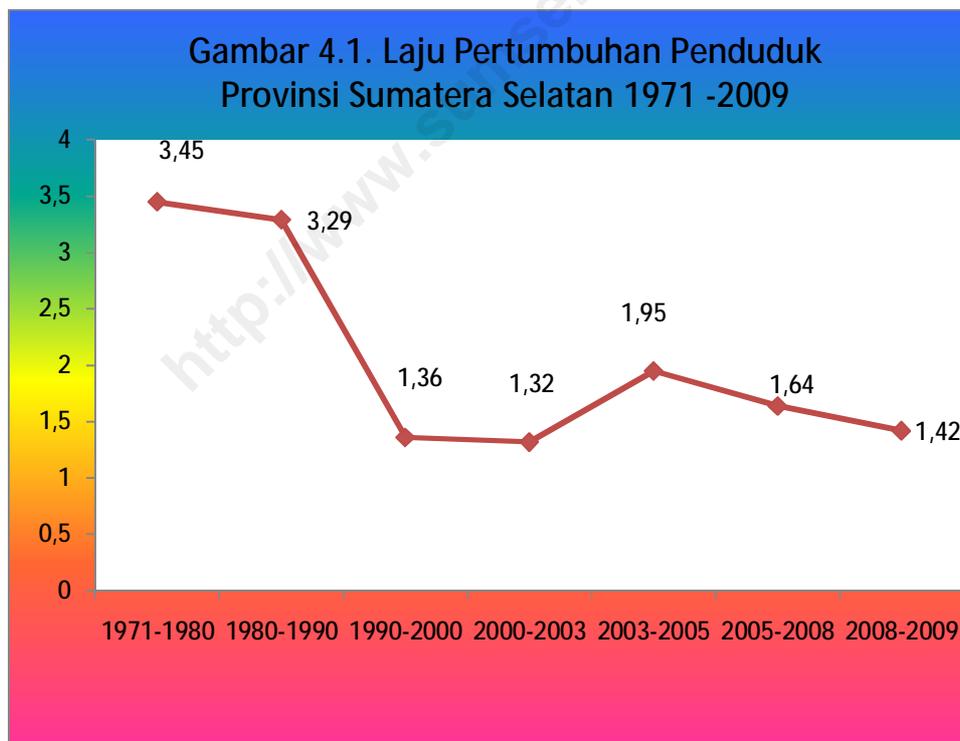
#### 4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2009 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 7.222.635 jiwa, yang menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi ke-9 terbesar penduduknya di Indonesia. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk sebesar 2,931 juta jiwa, meningkat menjadi 3,975 pada tahun 1980, 5,493 juta jiwa pada tahun 1990, 6,273 pada tahun 2000 serta pada tahun 2008 menjadi 7,122 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang

berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan terus mengalami penurunan diantaranya melalui program KB. Selama periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan mencapai 3,45 persen per tahun turun menjadi 3,29 per tahun pada periode 1980-1990, pada tahun 1990-2000 pertumbuhan penduduk menjadi 1,36 persen per tahun. Berdasarkan hasil Supas 2005 dan Susenas 2008, pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan sedikit meningkat pada periode 2005-2008 menjadi 1,64 persen per tahun. Pada tahun 2008-2009, pertumbuhan penduduk kembali turun menjadi 1,42 persen per tahun.



Tabel 4.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2009

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1971(SP 1971)	2.930.830	-	34
1980 (SP 1980)	3.975.904	3,45	46
1990 (SP 1990)	5.492.993	3,29	64
2000 (SP 2000)	6.274.546	1,36	73
2003 (P4B)	6.503.918	1,32	75
2005 (Supas)	6.782.339	1,95	78
2006	6.917.881	1,64	80
2007	7.019.964		81
2008	7.121.790		82
2009	7.222.635	1,42	84

Catatan:

- 1) Tahun 1971, 1980, dan 1990 keadaan akhir Oktober
- 2) Tahun 2000 keadaan akhir Juni
- 3) Tahun 2003 keadaan akhir April
- 4) Tahun 2005-2009 merupakan angka pertengahan tahun

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.2 menyajikan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2009, jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk 1,438 juta jiwa. Kabupaten/kota yang lain umumnya jauh lebih kecil berkisar antara 116,5 ribu jiwa yang terkecil di Kota Pagaralam sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 818,3 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk antara kabupaten/kota dalam setahun terakhir juga cukup bervariasi. Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin mempunyai laju

pertumbuhan penduduk yang tertinggi yaitu berturut-turut 2,50 dan 2,48 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Lahat, Empat Lawang dan Kota Pagaralam, masing-masing sebesar 0,15 persen.

Tabel 4.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk					LPP 2008- 2009
	2005	2006	2007	2008	2009	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	256.245	259.968	262.383	264.743	267.022	0,86
(02) Ogan Komering Ilir	659.398	674.072	685.296	696.505	707.627	1,60
(03) Muara Enim	634.696	645.603	653.304	660.906	668.341	1,12
(04) Lahat	336.730	339.203	339.928	340.556	341.055	0,15
(05) Musi Rawas	476.287	485.588	492.437	499.238	505.940	1,34
(06) Musi Banyuasin	471.011	485.507	497.864	510.387	523.025	2,48
(07) Banyuasin	736.700	759.162	778.627	798.360	818.280	2,50
(08) OKU Selatan	318.519	323.185	326.162	329.071	331.879	0,85
(09) OKU Timur	558.186	566.297	571.557	576.699	581.665	0,86
(10) Ogan Ilir	358.380	366.285	372.431	378.570	384.663	1,61
(11) Empat Lawang	211.160	212.711	213.165	213.559	213.872	0,15
(71) Palembang	1.344.032	1.372.802	1.394.954	1.417.047	1.438.938	1,54
(72) Prabumulih	130.850	133.098	134.686	136.253	137.786	1,13
(73) Pagar Alam	115.010	115.854	116.102	116.316	116.486	0,15
(74) Lubuk Linggau	175.135	178.539	181.068	183.580	186.056	1,35
Sumatera Selatan	6.782.339	6.917.881	7.019.964	7.121.790	7.222.635	1,42

Sumber: BPS; Supas 2005 dan Proyeksi

#### 4.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Perubahan tingkat kepadatan penduduk Sumatera Selatan terbilang cukup pesat. Pada tahun 1971 tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 34 orang per km<sup>2</sup>, naik menjadi 46 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 1980, berubah menjadi 64 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 1990 dan pada tahun 2000 kepadatan penduduk menjadi 73 per km<sup>2</sup>. Ini berarti bahwa dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, kepadatan penduduk Sumatera Selatan menjadi lebih dari 3 kali lipat (Tabel 4.1). Namun demikian, pada beberapa tahun terakhir perubahan kepadatan penduduk mulai melambat sejalan dengan menurunnya pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan. Pada tahun 2008 kepadatan penduduk sebesar 82 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan pada tahun 2009 tingkat kepadatan penduduk Sumatera Selatan sebesar 84 jiwa/ km<sup>2</sup>

Penyebaran penduduk antar kabupaten/kota tampak masih cukup timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2009

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>				
		2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	3.849,84	67	68	68	69	69
(02) Ogan Komering Ilir	17.928,21	37	38	38	39	39
(03) Muara Enim	8.481,93	75	76	77	78	79
(04) Lahat	4.233,26	80	80	80	80	81
(05) Musi Rawas	12.185,43	39	40	40	41	42
(06) Musi Banyuasin	14.775,73	32	33	34	35	35
(07) Banyuasin	10.967,80	67	69	71	73	75
(08) OKU Selatan	4.122,25	77	78	79	80	81
(09) OKU Timur	3.395,99	164	167	168	170	171
(10) Ogan Ilir	2.382,48	150	154	156	159	161
(11) Empat Lawang	2.391,87	88	89	89	89	89
(71) Palembang	358,55	3.749	3.829	3.891	3.952	4.013
(72) Prabumulih	406,39	322	328	331	335	339
(73) Pagar Alam	590,85	195	196	196	197	197
(74) Lubuk Linggau	360,74	485	495	502	509	516
Sumatera Selatan	86.431,32	78	80	81	82	84

Catatan:

Revisi Luas Wilayah berdasarkan hasil Pemetaan SP2010

Sumber: BPS; Dihitung dari SP2000, Supas 2005 dan Proyeksi

Tidak meratanya persebaran penduduk Sumatera Selatan menyebabkan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota sangat bervariasi. Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi mempunyai kepadatan penduduk yang paling besar, yaitu 4.013 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan mempunyai kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil. Kota Lubuklinggau,

misalnya, yang mempunyai kepadatan penduduk paling besar setelah Kota Palembang, tingkat kepadatan penduduknya hanya 516 orang per km<sup>2</sup>. Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil meskipun mempunyai jumlah penduduk yang besar karena memiliki wilayah yang sangat luas.

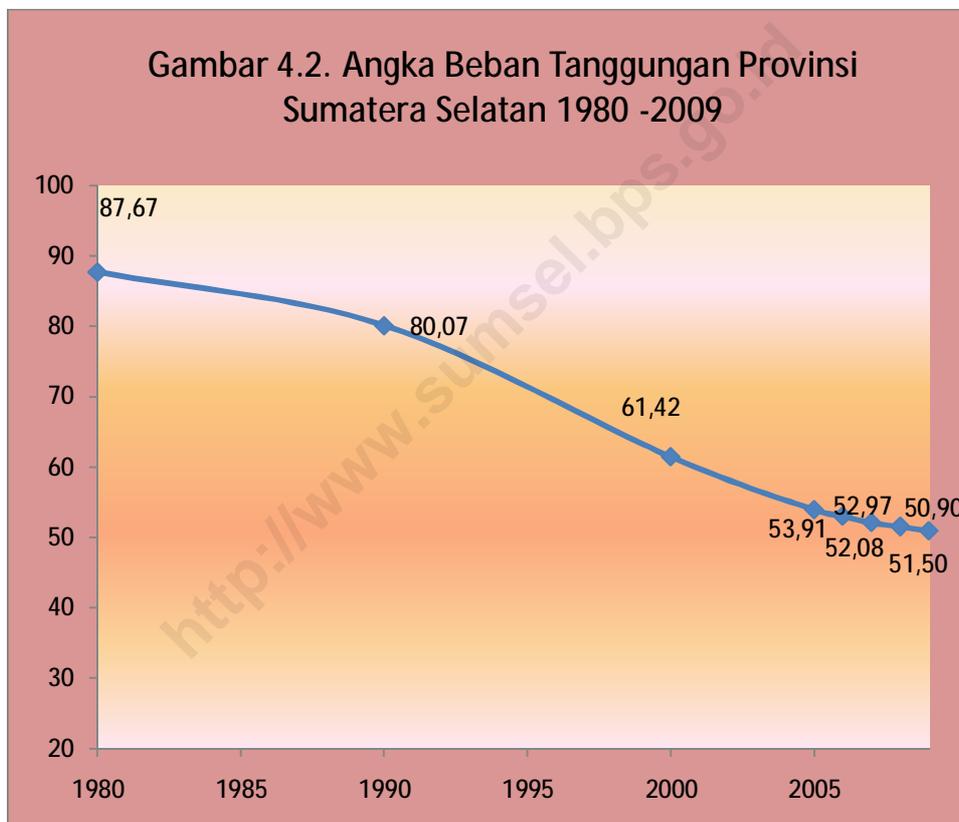
Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Tabel 4.4. Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 1980-2009

Tahun	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	44,10	53,29	2,61	87,67
1990	41,68	55,53	2,78	80,07
2000	34,94	61,95	3,11	61,42
2005	31,47	64,97	3,55	53,91
2006	31,04	65,37	3,59	52,97
2007	30,60	65,75	3,65	52,08
2008	30,32	66,01	3,67	51,50
2009	30,03	66,27	3,71	50,90

Sumber: BPS; SP80, SP90, SP2000, Supas 2005 dan Proyeksi

Selama periode 1980-2009 angka beban tanggungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 1980 rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 88 penduduk tidak produktif. Pada tahun 1990 angka beban tanggungan penduduk Sumatera Selatan turun menjadi 80,07 persen dan pada tahun 2000 sebesar 61,42 persen. Saat ini (tahun 2009), angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 50,90 persen.



Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 4.4. menunjukkan bahwa pada tahun 1980 ada sebanyak 44,10 persen penduduk Sumatera Selatan yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 41,68 persen pada tahun 1990. Pada tahun 2000 proporsi penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 34,94 persen, sedangkan pada tahun 2009 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 30,03 persen.

Struktur umur penduduk Sumatera Selatan berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun ) saat ini sudah lebih rendah dari 40 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen. Proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih tahun 1980 hanya 2,61 persen dan meningkat menjadi 3,11 persen pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 3,71 persen pada tahun 2009.

Struktur umur penduduk tahap transisi ini juga ditemui di hampir seluruh kabupaten/kota. Menurut kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) semuanya kurang dari 40 persen yaitu bervariasi antara 27,30 persen di Kota Palembang sampai yang tertinggi 36,69 persen di Kabupaten OKU Selatan, sedangkan proporsi penduduk lansia umumnya masih di bawah 5 persen yaitu antara 2,91 persen di Kabupaten Banyuasin sampai dengan 5,35 persen di Kabupaten Ogan Ilir. Proporsi penduduk lansia di atas 5 persen dijumpai di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Pagaralam.

Tabel 4.5. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	28,50	68,01	3,49	47,03
(02) Ogan Komering Ilir	28,56	67,56	3,88	48,02
(03) Muara Enim	31,09	65,52	3,39	52,63
(04) Lahat	29,86	65,90	4,24	51,75
(05) Musi Rawas	34,73	61,63	3,64	62,25
(06) Musi Banyuasin	33,21	63,63	3,16	57,16
(07) Banyuasin	28,26	68,84	2,91	45,27
(08) OKU Selatan	36,69	59,37	3,93	68,42
(09) OKU Timur	28,47	67,78	3,75	47,54
(10) Ogan Ilir	29,90	64,74	5,35	54,46
(11) Empat Lawang	30,57	64,69	4,73	54,58
(71) Palembang	27,30	69,12	3,58	44,68
(72) Prabumulih	35,68	60,33	3,99	65,75
(73) Pagar Alam	27,94	66,96	5,10	49,34
(74) Lubuk Linggau	31,07	65,49	3,45	52,70
Sumatera Selatan	30,03	66,27	3,71	50,90

Sumber: BPS; Susenas 2009

Angka beban tanggungan antar kabupaten/kota bervariasi antara yang terkecil terdapat di Kota Palembang (44,68 persen) sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (68,42 persen). Rendahnya angka beban tanggungan di Kota Palembang lebih disebabkan rendahnya proporsi penduduk

usia muda sebagai akibat rendahnya fertilitas, sedangkan tingginya angka beban tanggungan di Kabupaten OKU Selatan jika diamati pada Tabel 4.5 disebabkan tingginya proporsi penduduk usia muda.

### 2.3 Fertilitas

Hasil Sensus Penduduk, SDKI dan Supas menunjukkan penurunan tingkat fertilitas dari wanita usia subur (TFR) dari waktu ke waktu. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 TFR di Sumatera Selatan diperkirakan sebesar 5,56 per 1000 wanita usia subur. Angka ini terus mengalami penurunan, berturut-turut 4,78 menurut hasil Supas 1985, menjadi 4,22 berdasarkan hasil SP 1990, menurut SDKI 1991 sebesar 3,43, hasil SDKI 1994 sebesar 2,87, hasil SDKI 1997 sebesar 2,64 dan menurut hasil SDKI 2002-2003 turun menjadi 2,3. Berdasarkan data yang dihitung dari Supas 2005, angka TFR di Sumatera Selatan kembali turun menjadi sebesar 2,26 per 1000 wanita usia subur. Sedangkan menurut hasil SDKI 2007, angka TFR di Sumatera Selatan cenderung meningkat yaitu sebesar 2,7.

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas di Sumatera Selatan karena berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap keselamatan ibu maupun anak. Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang wanita, terutama di daerah pedesaan.

Tabel 4.6. Beberapa Indikator Fertilitas Sumatera Selatan

Tahun	TFR	Persentase Wanita Hamil Usia 15-49 Tahun	Rata-rata ALH Wanita Usia 40-49 Tahun	Median Umur Persalinan Pertama Wanita Usia 25-49 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SP 1980	5,56			
Supas 1985	4,78			
SP 1990	4,22			
SDKI 1991	3,43	-	5,26	-
SDKI 1994	2,87	4,12	5,20	20,7
SDKI 1997	2,64	3,70	5,10	21,0
SDKI 2002-2003	2,3	2,5	4,4	20,6
Supas 2005	2,26			
SDKI 2007	2,7	3,1	4,2	20,9

Sumber: BPS; SDKI, 1991, 1994, 1997, 2002-2003 dan 2007; SP80; SP90; Supas 1985 dan 2005

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa secara umum dalam jangka panjang ada kecenderungan wanita mulai menunda usia perkawinan pertamanya. Pada tahun 1995 persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya berusia 16 tahun atau kurang masih cukup tinggi yaitu sebanyak 23,86. Lima tahun kemudian terjadi penurunan persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah yaitu 20,35 persen dan pada tahun 2005 angkanya menjadi dibawah 20 persen yaitu hanya 17,28 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2008 terjadi sedikit peningkatan persentase wanita yang menikah umur 16 tahun ke bawah yang kemudian turun kembali menjadi 20,23 persen pada tahun 2009.

Tabel 4.7. Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1995, 2000, 2005, 2008 dan 2009

Umur Perkawinan Pertama (Tahun)	Persentase				
	1995	2000	2005	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
≤ 16	23,86	20,35	17,28	21,33	20,23
17-18	28,40	25,39	26,52	25,39	25,17
19-24	41,75	44,78	46,27	42,10	43,02
25+	6,00	9,48	9,94	11,18	11,58
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 1995, 2000, 2005, 2008 dan 2009

Keadaan itu selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anaknya juga di sebabkan oleh kecenderungan masyarakat terutama wanita untuk memilih bekerja, baik sebagai pembantu rumah tangga maupun buruh pabrik di perkotaan. Keadaan itu tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi yang berdampak pada perubahan pola pikir yang akan membuka wawasan baru bagi wanita khususnya di perdesaan.

Persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah sangat bervariasi bila dilihat menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2009 yang terendah adalah di Kota Prabumulih yaitu 12,93 persen. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah cukup rendah yaitu yaitu Kota Palembang (13,52 persen), Kabupaten Ogan Komering Ulu (14,35 persen) dan Kota Lubuklinggau (15,22 persen) dan Sementara itu kabupaten yang masih terlihat cukup tinggi

persentase wanita yang kawin pertamanya 16 tahun ke bawah yaitu Kabupaten Empat Lawang (30,81 persen).

Tabel 4.8. Persentase Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama 2009

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama				Total
	<=16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	14,35	24,42	45,58	15,65	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	16,65	30,49	46,84	6,03	100,00
(03) Muara Enim	24,37	30,95	36,23	8,45	100,00
(04) Lahat	19,97	24,15	41,73	14,14	100,00
(05) Musi Rawas	25,07	32,27	37,39	5,27	100,00
(06) Musi Banyuasin	25,43	26,02	40,15	8,40	100,00
(07) Banyuasin	20,33	25,97	43,77	9,93	100,00
(08) OKU Selatan	24,49	28,43	41,59	5,49	100,00
(09) OKU Timur	27,37	28,02	38,35	6,26	100,00
(10) Ogan Ilir	18,38	21,73	46,75	13,14	100,00
(11) Empat Lawang	30,81	22,77	38,83	7,59	100,00
(71) Palembang	13,52	16,72	47,54	22,22	100,00
(72) Prabumulih	12,93	20,55	49,00	17,53	100,00
(73) Pagar Alam	16,62	23,09	48,64	11,65	100,00
(74) Lubuk Linggau	15,22	22,45	47,36	14,97	100,00
Sumatera Selatan	20,23	25,17	43,02	11,58	100,00

Sumber: BPS; Susenas 2009

## BAB V

### KESEHATAN

Salah satu aspek terpenting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

#### 5.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 1990, estimasi angka kematian bayi di Sumatera Selatan diperkirakan 71 per 1000 kelahiran, sedangkan berdasarkan SP 2000, angka kematian bayi di Sumatera Selatan turun drastis menjadi 53 per 1000 kelahiran, atau turun 25 persen selama 10 tahun atau rata-rata turun 2,5 persen per tahun. Angka kematian bayi di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan hingga menurut hasil Supas tahun 2005 diperkirakan sebesar 30 per 1000 kelahiran.

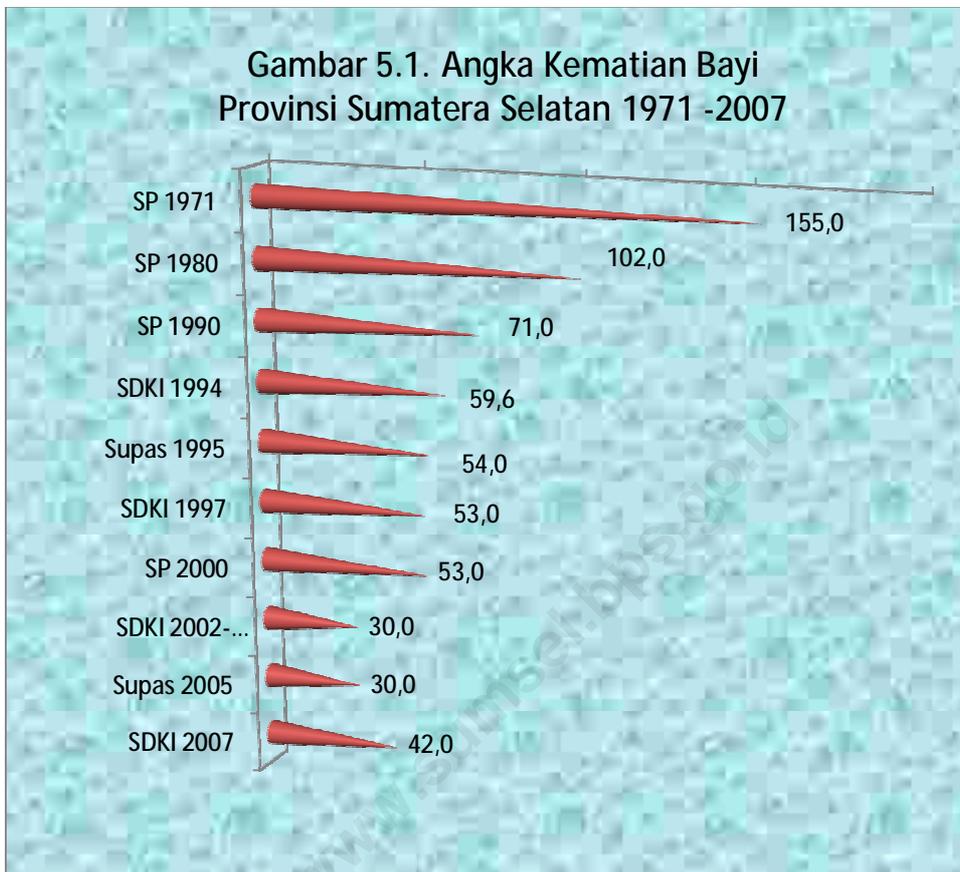
Sejalan dengan menurunnya estimasi angka kematian bayi, maka estimasi angka harapan hidup mengalami kenaikan. Menurut hasil SP 1990, estimasi angka harapan hidup Sumatera Selatan adalah 59,83 tahun, sepuluh tahun kemudian mengalami kenaikan sebesar 7 persen, menjadi 64,02 tahun menurut SP 2000. Sedangkan menurut hasil Supas 2005 besarnya angka harapan hidup penduduk Sumatera Selatan adalah sebesar 69,5 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak yang baru lahir diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 69 tahun.

Tabel 5.1. Angka Kematian Bayi dan Anak serta Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak	Angka Harapan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
SP 1971	155		44,1
SP 1980	102		53,6
SP 1990	71		59,83
SDKI 1994	59,6	34,5	
Supas 1995	54		63,7
SDKI 1997	53	18,4	
SP 2000	53		64,02
SDKI 2002-2003	30	19,0	
Supas 2005	30		69,5
SDKI 2007	42	11	

Sumber: BPS; SDKI, 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007; SP80, SP90, Supas 1995 dan 2005.

Gambar 5.1. Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan 1971 -2007



Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan, yaitu persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari. Tabel 5.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada tahun 2009 mengalami kenaikan dibanding keadaan tahun sebelumnya. Terlihat bahwa angka kesakitan berturut-turut sebesar 31,33 persen pada tahun 2007, 35,52 persen pada tahun 2008 dan 32,38 persen pada tahun 2008. Di antara mereka yang terganggu kesehatannya, rata-rata

lamanya sakit atau lamanya terganggu aktivitas sehari-harinya cenderung menurun, yaitu dari 6,65 hari pada tahun 2007 menjadi 5,54 hari pada tahun 2008 dan 5,01 hari pada tahun 2009.

Tabel 5.2. Angka Kesakitan Dan Rata-Rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2007 – 2009

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan			Rata-rata Lama Sakit		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	35.14	35,98	<b>31,12</b>	5.83	5,11	4,87
(02) Ogan Komering Ilir	26.88	24,65	<b>27,42</b>	6.58	6,88	4,23
(03) Muara Enim	25.28	27,57	<b>25,57</b>	5.05	4,45	4,69
(04) Lahat	36.57	40,95	<b>36,56</b>	6.91	6,06	6,11
(05) Musi Rawas	31.75	38,00	<b>30,15</b>	6.10	5,75	5,60
(06) Musi Banyuasin	36.13	27,87	<b>25,34</b>	5.54	6,48	6,41
(07) Banyuasin	24.91	19,67	<b>16,71</b>	4.70	4,37	4,62
(08) OKU Selatan	33.45	32,44	<b>34,07</b>	6.56	5,74	3,88
(09) OKU Timur	33.41	37,47	<b>34,46</b>	7.12	5,26	5,07
(10) Ogan Ilir	43.23	50,02	<b>40,63</b>	7.39	5,87	5,42
(11) Empat Lawang	36.77	46,45	<b>38,68</b>	9.03	5,56	4,79
(71) Palembang	32.94	49,44	<b>44,86</b>	7.98	5,25	5,03
(72) Prabumulih	30.84	26,58	<b>28,88</b>	6.12	5,58	4,72
(73) Pagar Alam	21.07	31,90	<b>33,74</b>	5.62	6,12	5,22
(74) Lubuk Linggau	21.42	36,31	<b>36,28</b>	6.36	4,94	4,18
Sumatera Selatan	31.33	35,52	<b>32,38</b>	6.65	5,54	5,01

Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

### 3.2 Pemberian ASI dan Imunisasi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2009 rata-rata lamanya balita usia 1 – 4 tahun disusui 18,12 bulan. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2008 dan 2007 di mana rata-rata lamanya balita disusui sebesar 19,93 bulan pada tahun 2008 dan 19,64 pada tahun 2007.

Pemberian ASI eksklusif secara rata-rata masih dibawah standar pemberian ASI eksklusif minimal yaitu 6 bulan. Pada tahun 2009, rata-rata balita usia 1 – 4 tahun diberi ASI eksklusif sebesar 4,84 bulan. Dibandingkan tahun 2008 dan 2007, terlihat angka-angka yang berfluktuasi dari 4,63 bulan pada tahun 2007, naik menjadi 4,91 bulan pada tahun 2008 dan kemudian turun kembali menjadi 4,84 bulan pada tahun 2009 (Tabel 5.3.).

Dilihat menurut kabupaten/kota, ada kecenderungan lama pemberian ASI di daerah perkotaan lebih pendek di bandingkan daerah pedesaan. Terlihat pada Tabel 5.3. bahwa rata-rata lama pemberian ASI di 4 Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2009 (Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau) lebih rendah dibandingkan kabupaten yang lain di Sumatera Selatan. Mudah dipahami bahwa di daerah perkotaan wanita/ibu yang bekerja di sektor formal lebih tinggi sehingga sedikit banyak akan berdampak pada pemberian ASI bagi bayi mereka. Namun demikian, dilihat dari pemberian ASI eksklusif nampak tidak ada perbedaan yang berarti antara daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.3 Rata-Rata Lama(Bulan) Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI dan ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/ Kota, 2007 – 2009

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama (Bulan) Mendapat ASI			Rata-Rata Lama (Bulan) Mendapat ASI Eksklusif		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	18,88	19,25	18,06	4,64	5,21	5,80
(02) Ogan Komering Ilir	23,31	21,36	19,99	4,21	4,14	4,23
(03) Muara Enim	19,22	20,79	20,40	4,97	4,89	5,82
(04) Lahat	19,43	18,25	17,46	3,68	4,86	4,56
(05) Musi Rawas	18,95	21,99	19,33	4,60	4,83	4,43
(06) Musi Banyuasin	20,68	20,29	19,11	5,25	5,30	4,88
(07) Banyuasin	18,99	19,76	16,89	3,84	4,91	4,92
(08) OKU Selatan	20,48	19,74	19,19	4,21	4,74	5,29
(09) OKU Timur	19,99	20,20	18,94	6,07	6,35	5,59
(10) Ogan Ilir	21,31	23,14	20,85	4,79	4,68	4,80
(11) Empat Lawang	19,14	17,55	16,30	4,69	5,05	5,89
(71) Palembang	17,76	18,26	15,58	4,67	4,53	3,91
(72) Prabumulih	19,49	19,41	15,36	4,44	4,92	4,70
(73) Pagar Alam	17,91	16,86	16,23	4,09	5,24	6,36
(74) Lubuk Linggau	17,78	19,05	16,33	5,13	5,49	5,68
Sumatera Selatan	19,64	19,93	18,12	4,63	4,91	4,84

Sumber: BPS; Susenas 2007 – 2009

Tabel 5.4 Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/ Kota, 2007 – 2009

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	35,64	37,46	52,32
(02) Ogan Komering Ilir	30,22	25,90	32,79
(03) Muara Enim	30,20	38,30	38,12
(04) Lahat	20,96	33,45	37,15
(05) Musi Rawas	27,42	30,95	25,54
(06) Musi Banyuasin	32,39	36,13	32,21
(07) Banyuasin	17,90	29,59	39,02
(08) OKU Selatan	26,50	27,54	46,25
(09) OKU Timur	36,01	41,46	50,52
(10) Ogan Ilir	29,33	35,24	31,58
(11) Empat Lawang	38,05	42,48	50,01
(71) Palembang	27,41	33,81	30,86
(72) Prabumulih	36,53	29,03	45,62
(73) Pagar Alam	18,14	44,52	50,76
(74) Lubuk Linggau	27,24	45,26	53,40
Sumatera Selatan	28,28	34,09	37,45

Sumber: BPS; Susenas 2007 – 2009

Tabel 5.4. menyajikan persentase balita usia 1 – 4 tahun yang mendapat ASI eksklusif menurut kabupaten/kota tahun 2007 – 2009. Secara keseluruhan ada kecenderungan peningkatan persentase pemberian ASI eksklusif pada balita usia 1 – 4 tahun pada periode 2007 – 2009. Terlihat bahwa pada tahun 2007, persentase balita yang mendapat ASI eksklusif sebesar 28,28 persen, meningkat menjadi 34,09 persen pada tahun 2008 dan kembali meningkat menjadi 37,45 persen pada tahun 2009.

Selain pemenuhan ASI bagi balita, pemberian imunisasi juga sangat penting untuk memberikan kekebalan bagi balita terhadap berbagai jenis penyakit tertentu yang cukup berbahaya. Jenis imunisasi yang umum diberikan pada balita diantaranya BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis. Data pada Tabel 5.5 menunjukkan bahwa secara rata-rata balita di Sumatera Selatan pernah diberi 5 jenis imunisasi tersebut minimal sekali. Ada kecenderungan pemberian imunisasi di daerah perkotaan lebih sering dibandingkan daerah perdesaan. Sedangkan jenis imunisasi DPT dan Polio merupakan jenis yang paling sering diberikan karena sesuai ketentuan yang diberikan bahwa kedua jenis imunisasi ini diberikan kepada balita masing-masing sebanyak 3 kali.

Tabel 5.5 Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Jenis Imunisasi, 2007-2009

Jenis Imunisasi	Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita		
	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	1,01	0,90	0,93
DPT	2,16	2,09	2,23
Polio	2,40	2,23	2,39
Campak/Morbili	0,90	0,75	0,77
Hepatitis B	1,84	1,90	2,12

Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

Tabel 5.6 Rata-rata Frekuensi Imunisasi Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2009

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	0,96	2,24	2,35	0,79	1,87
(02) Ogan Komering Ilir	0,90	2,22	2,61	0,77	2,18
(03) Muara Enim	0,96	2,24	2,28	0,74	2,11
(04) Lahat	0,96	2,30	2,57	0,87	2,43
(05) Musi Rawas	0,93	2,31	2,19	0,73	2,11
(06) Musi Banyuasin	0,84	1,59	1,60	0,68	1,40
(07) Banyuasin	0,91	2,33	2,48	0,80	2,14
(08) OKU Selatan	0,89	2,27	2,54	0,79	2,11
(09) OKU Timur	0,98	2,62	2,83	0,84	2,51
(10) Ogan Ilir	0,90	1,85	2,15	0,74	1,72
(11) Empat Lawang	0,74	1,12	1,30	0,60	0,96
(71) Palembang	0,97	2,47	2,64	0,78	2,44
(72) Prabumulih	0,94	1,90	2,15	0,84	1,75
(73) Pagar Alam	0,98	2,14	2,49	0,84	2,11
(74) Lubuk Linggau	0,95	2,38	2,39	0,79	2,31
Sumatera Selatan	0,93	2,23	2,39	0,77	2,12

Sumber: BPS; Susenas 2009

Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka frekuensi pemberian imunisasi balita relatif tidak banyak berbeda antar kabupaten/kota (Tabel 5.6). Artinya imunisasi telah mencakup seluruh wilayah Sumatera Selatan secara menyeluruh, salah satunya disebabkan karena adanya program pemberian imunisasi secara serentak melalui Pekan Imunisasi Nasional. Dari kelima jenis

imunisasi tersebut, Kabupaten Empat Lawang terlihat memiliki frekuensi imunisasi pada balita yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota yang lain, sedangkan keempat kota yang ada di Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau memiliki rata-rata frekuensi imunisasi balita cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya.

Tabel 5.7 Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten/ Kota, 2007 – 2009

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	59,80	47,56	41,32
(02) Ogan Komering Ilir	29,44	60,84	60,96
(03) Muara Enim	40,26	39,13	59,77
(04) Lahat	45,63	62,72	62,05
(05) Musi Rawas	42,45	48,81	67,23
(06) Musi Banyuasin	30,30	36,01	25,86
(07) Banyuasin	47,58	48,55	63,74
(08) OKU Selatan	39,24	40,78	68,00
(09) OKU Timur	55,37	62,24	88,99
(10) Ogan Ilir	62,53	49,46	38,12
(11) Empat Lawang	36,23	48,13	14,15
(71) Palembang	68,36	68,29	78,19
(72) Prabumulih	53,79	66,54	46,58
(73) Pagar Alam	88,59	34,86	56,16
(74) Lubuk Linggau	68,75	29,18	82,74
Sumatera Selatan	49,75	52,75	62,34

Sumber: BPS; Susenas 2007 – 2009

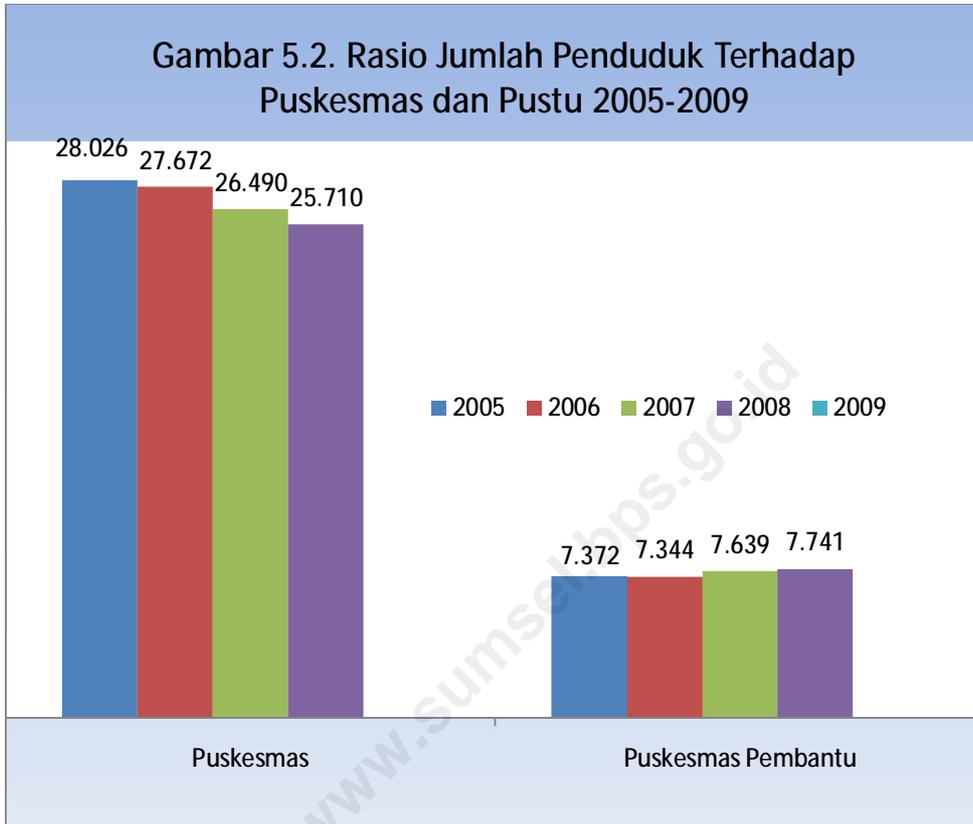
### 3.3 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok. Namun ketersediaannya masih dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Pada Tabel 3.6 jumlah puskesmas yang tersedia selama periode 2005 – 2008 mengalami peningkatan, pada tahun 2005 tersedia 242 puskesmas, sedangkan pada tahun 2008 menjadi 277 puskesmas. Sedangkan untuk jumlah puskesmas pembantu mengalami flutuasi dari 920 pada tahun 2005, naik menjadi 942 pada tahun 2006, turun menjadi 919 pada tahun 2007 dan kemudian naik menjadi 920 tahun 2008. Jumlah Rumah Sakit pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2005, demikian juga jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit mengalami kenaikan, yaitu dari 4.680 pada tahun 2005 menjadi 4.955 pada tahun 2008.

Tabel 5.8 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2006 – 2009

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Sakit	45	40	49	48
Puskesmas	250	265	277	291
Puskesmas Pembantu	942	919	920	920
Tempat Tidur Rumah Sakit	3.863	4.081	4.955	5.303
Posyandu	5.786	6.231	6.274	6.186

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, 2009



Dilihat dari rasio jumlah penduduk terhadap sarana kesehatan khususnya puskesmas dan puskesmas pembantu, ada kecenderungan rasio jumlah penduduk terhadap puskesmas menurun pada periode 2005-2008, sedangkan puskesmas pembantu rasionya cenderung naik (Gambar 3.2.). Ini berarti penambahan jumlah puskesmas belum mampu mengimbangi penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2008, 1 puskesmas melayani sekitar 25.710 penduduk.

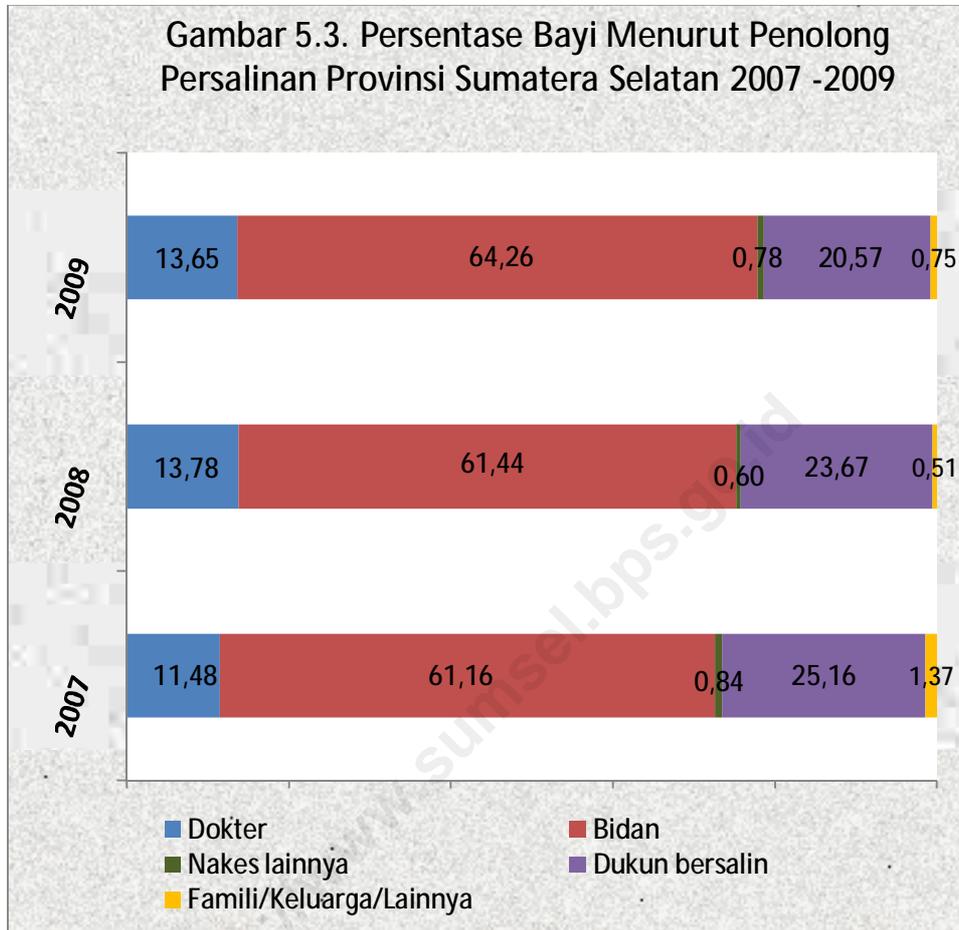
Tabel 5.9 Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan, 2006 – 2009

Penolong Persalinan	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter	7,82	11,48	13,78	13,65
Bidan	67,86	61,16	61,44	64,26
Nakes lainnya	0,94	0,84	0,60	0,78
Dukun bersalin	21,76	25,16	23,67	20,57
Famili/keluarga	1,44	1,11	0,45	0,62
Lainnya	0,17	0,26	0,06	0,13

Sumber: BPS; Susenas 2006, 2007, 2008 dan 2009

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Pada tahun 2009 terdapat 78,69 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan komposisi 13,65 persen oleh dokter, 64,26 persen oleh bidan dan 0,78 persen oleh tenaga kesehatan lainnya (Tabel 5.9). Dibandingkan tahun 2008, angka ini sedikit mengalami peningkatan dari 75,82 persen, demikian juga dibandingkan angka tahun 2007 (73,48 persen).

Gambar 5.3. Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan Provinsi Sumatera Selatan 2007 -2009



Sumber: Susenas 2007, 2008 dan 2009

Jika diamati terjadi peningkatan persentase persalinan yang dibantu oleh dokter maupun bidan pada periode 2007 – 2009. Meningkatnya persalinan yang dibantu dokter dan bidan diikuti oleh menurunnya persalinan yang ditolong dukun. Meskipun demikian, persentase persalinan oleh dukun sebesar 20,57 persen tergolong masih tinggi. Ini berarti bahwa sekitar 1 dari 5 kelahiran di Sumatera

Selatan masih ditolong dukun. Bahkan di beberapa kabupaten, angka persalinan oleh dukun sangat besar, seperti yang terjadi di Empat Lawang, OKU Selatan, Muara Enim, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir. Di daerah-daerah ini kelahiran yang ditolong oleh dukun di atas 30 persen (Tabel 3.8), artinya 1 dari 3 kelahiran ditolong oleh tenaga non medis, bahkan di Empat Lawang, 1 dari 2 kelahiran ditolong oleh dukun. Tingginya persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga medis tentu saja meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu maupun kematian bayi. Patut dicurigai tenaga-tenaga bidan desa yang ada di daerah-daerah tersebut relatif sedikit sehingga masyarakat memiliki akses yang terbatas pada tenaga kesehatan khususnya di daerah perdesaan.

Tabel 5.10 Persentase Bayi Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan, 2009

Kabupaten/Kota	Penolong Persalinan					Total
	Dokter	Bidan	Nakes Lainnya	Dukun bersalin	Famili /keluarga/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	15,81	65,68	1,06	16,40	1,06	100
(02) Ogan Komering Ilir	7,44	73,93	-	18,63	-	100
(03) Muara Enim	10,83	52,09	0,37	35,61	1,11	100
(04) Lahat	13,92	52,47	1,01	29,28	3,31	100
(05) Musi Rawas	1,69	72,03	2,55	23,31	0,42	100
(06) Musi Banyuasin	7,01	57,01	0,68	34,27	1,03	100
(07) Banyuasin	7,90	66,22	1,17	24,13	0,58	100
(08) OKU Selatan	1,29	59,02	1,72	36,25	1,72	100
(09) OKU Timur	10,55	75,63	1,03	12,79	-	100
(10) Ogan Ilir	12,74	56,34	-	30,50	0,42	100
(11) Empat Lawang	2,65	43,36	0,88	53,11	-	100
(71) Palembang	33,01	63,73	0,33	2,29	0,65	100
(72) Prabumulih	22,66	70,25	-	7,09	-	100
(73) Pagar Alam	8,58	81,03	2,02	8,36	-	100
(74) Lubuk Linggau	11,94	84,64	0,70	1,91	0,81	100
Sumatera Selatan	13,65	64,26	0,78	20,57	0,75	100

Sumber: BPS; Susenas 2009

Tabel 5.11 Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2007 – 2009

Jenis/Cara Pengobatan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Obat/cara modern	63,75	70,80	65,44
Obat/cara tradisional	8,28	5,74	7,19
Obat/cara lainnya	1,18	1,52	1,32
Obat/cara modern dan tradisional	17,02	16,37	19,60
Obat/cara modern dan lainnya	1,58	3,25	2,17
Obat/cara tradisional dan lainnya	4,02	0,95	1,16
Obat/Cara Modern, Tradisional dan Lainnya	4,17	1,37	3,12
Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri	67,54	72,85	76,98

Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Selama periode 2007 – 2009 nampak bahwa persentase penduduk yang mengobati sendiri cenderung meningkat (Tabel 5.11), sedangkan penduduk yang berobat jalan berfluktuasi (Tabel 5.13). Penduduk yang mengobati sendiri sakitnya pada tahun 2007 sebesar 67,54 persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 72,85 persen dan pada tahun 2009 naik kembali menjadi 76,98 persen (Tabel 5.11). Bagi penduduk yang berobat sendiri pengobatan secara modern menjadi pilihan utama mereka, terbukti sebagian besar penduduk yang sakit menggunakan obat modern baik obat modern sendiri maupun bersama obat tradisional dan lainnya. Pada tahun

2009, penduduk yang memakai obat modern secara total mencapai 90,33 persen (65,44 persen menggunakan obat modern saja dan sisanya 24,89 persen menggunakan gabungan dari tiga jenis pengobatan tersebut), meningkat dibandingkan tahun 2007 yang besarnya 77,61. Sementara yang menggunakan pengobatan tradisional saja mengalami penurunan dari 10,89 persen pada tahun 2006 menjadi 8,28 persen pada tahun 2007 dan 5,74 persen pada tahun 2008.

Dilihat dari variasi antar kabupaten/kota, penggunaan obat modern baik obat modern saja maupun bersama dengan cara tradisional atau lainnya relatif merata antar kabupaten, meskipun di beberapa kabupaten/kota penggunaan obat tradisional saja masih tinggi seperti dijumpai di Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan OKI (Tabel 3.10)

Tabel 5.12. Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2009

Kabupaten/Kota	Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan							Total
	Modern	Tradisional	Lainnya	Modern dan Tradisional	Modern dan Lainnya	Tradisional dan Lainnya	Modern, Tradisional dan Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	59,93	7,90	5,45	17,71	3,66	4,25	1,09	100
(02) Ogan Komering Ilir	68,49	8,72	0,49	20,43	0,33	0,37	1,18	100
(03) Muara Enim	51,33	12,49	1,33	30,85	3,33	0,44	0,22	100
(04) Lahat	45,29	11,91	0,35	36,69	1,54	0,38	3,84	100
(05) Musi Rawas	52,36	3,54	1,35	7,24	8,41	0,84	26,26	100
(06) Musi Banyuasin	50,14	10,90	0,58	34,29	0,78	0,78	2,53	100
(07) Banyuasin	61,60	7,16	-	28,95	0,75	1,16	0,38	100
(08) OKU Selatan	56,63	6,23	0,29	28,14	4,07	1,45	3,19	100
(09) OKU Timur	67,61	9,31	4,33	13,44	1,13	3,25	0,93	100
(10) Ogan Ilir	63,21	3,81	3,06	19,09	4,68	0,87	5,29	100
(11) Empat Lawang	45,96	8,98	1,41	37,32	2,82	0,88	2,64	100
(71) Palembang	81,11	5,05	0,66	11,10	1,16	0,41	0,50	100
(72) Prabumulih	77,98	7,68	0,58	10,48	1,19	0,88	1,20	100
(73) Pagar Alam	43,29	11,24	0,36	32,62	1,04	10,29	1,16	100
(74) Lubuk Linggau	84,05	2,87	0,47	11,88	0,27	0,47	-	100
Sumatera Selatan	65,44	7,19	1,32	19,60	2,17	1,16	3,12	100

Sumber: BPS; Susenas 2009

Sedangkan bagi penduduk yang berobat jalan, jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk adalah puskesmas/pustu (35,83 persen), kemudian petugas kesehatan lainnya (32,35 persen) dan praktek dokter (24,36 persen). Dibandingkan tahun 2006, terjadi penurunan penggunaan fasilitas puskesmas dan peningkatan kunjungan pada praktek dokter dan praktek tenaga

kesehatan lainnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2007, ada penurunan kunjungan ke praktek dokter dan peningkatan kunjungan ke puskesmas/pustu.

Tabel 5.13 Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2007 – 2009

Tempat Berobat	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	6,11	4,67	8,37
RS Swasta	4,83	3,51	4,33
Praktek Dokter/Poliklinik	26,22	24,36	24,15
Puskesmas/Pustu	32,26	35,83	33,76
Praktek Nakes	31,97	32,35	24,05
Praktek Batra	1,61	1,47	1,47
Dukun Bersalin	0,75	0,34	0,76
Lainnya	3,36	3,67	3,11
Persentase Penduduk yang Berobat Jalan	33,04	37,50	33,25

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2009

Menurut kabupaten/kota, jenis fasilitas berobat jalan yang paling sering dikunjungi bervariasi antar kabupaten/kota yaitu praktek dokter/poliklinai, puskesmas/pustu dan praktek nakes. Sebagian besar kabupaten memiliki fasilitas berobat jalan yang paling sering dikunjungi penduduk berupa praktek tenaga kesehatan (nakes). Fakta yang sedikit berbeda dijumpai di empat kota yang ada di Sumatera Selatan di mana fasilitas yang paling sering dipilih umumnya adalah praktek dokter, sedangkan di Kabupaten Muara Enim penduduk lebih sering mengunjungi puskesmas/pustu. Data pada Tabel 3.12 juga

memperlihatkan bahwa di semua kabupaten/kota terlihat kunjungan fasilitas pengobatan tradisional seperti praktek pengobatan tradisional (batra) dan dukun bersalin relatif kecil.

Tabel 5.14 Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, 2009

Kabupaten/Kota	Tempat Berobat							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas/ Pustu	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	6,33	3,74	25,97	30,52	20,14	1,95	-	11,36
(02) Ogan Komering Ilir	4,28	0,50	13,05	45,11	28,80	5,24	1,01	2,01
(03) Muara Enim	14,80	2,43	8,42	52,38	20,54	0,28	-	1,14
(04) Lahat	11,05	1,20	15,76	42,63	24,00	0,60	-	4,77
(05) Musi Rawas	6,10	3,55	15,48	29,70	36,03	4,32	1,53	3,30
(06) Musi Banyuasin	13,48	3,42	13,02	29,15	28,67	0,60	2,21	9,45
(07) Banyuasin	10,87	1,67	18,56	32,16	34,64	0,52	-	1,57
(08) OKU Selatan	3,19	2,14	12,30	26,17	47,55	-	1,06	7,59
(09) OKU Timur	8,52	4,74	12,19	32,98	35,16	2,11	-	4,30
(10) Ogan Ilir	8,45	0,28	12,63	36,00	35,19	0,62	1,83	5,00
(11) Empat Lawang	15,58	1,73	16,88	22,53	40,68	0,87	0,87	0,87
(71) Palembang	5,80	8,58	41,06	29,47	12,53	1,04	0,70	0,81
(72) Prabumulih	14,29	9,37	29,75	33,08	9,85	1,22	0,40	2,05
(73) Pagar Alam	10,61	3,87	55,38	23,57	5,59	0,28	0,28	0,42
(74) Lubuk Linggau	8,28	1,69	46,41	33,03	9,25	-	-	1,33
Sumatera Selatan	8,37	4,33	24,15	33,76	24,05	1,47	0,76	3,11

Sumber: BPS; Susenas 2009

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB VI

### PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan proses pembudayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain faktor kemiskinan keluarga.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Selain itu, ditingkatkan pula kesempatan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, bahkan semenjak tahun 1994 pemerintah juga melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan sampai saat ini masih terus melanjutkan program wajib belajar 6 tahun. dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

#### 6.1. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan

huruf lainnya. Persentase penduduk yang melek huruf pada tahun 2009 mencapai 97,21 persen, sisanya penduduk yang buta huruf sebesar 2,79 persen. Sementara pada penduduk usia 45 tahun ke atas yang melek huruf tercatat masing-masing 91,73 persen. Ini berarti penduduk yang tidak dapat membaca atau buta huruf lebih banyak dijumpai pada kelompok penduduk usia tua. Dibandingkan tahun 2007, angka melek huruf mengalami peningkatan.

Tabel 6.1 Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2007 – 2009

Kelompok Umur	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
15 – 24	99,61	99,66	99,92
15 – 44	99,13	99,14	99,49
45+	92,32	91,97	91,73
15+	96,66	97,04	97,21

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2009

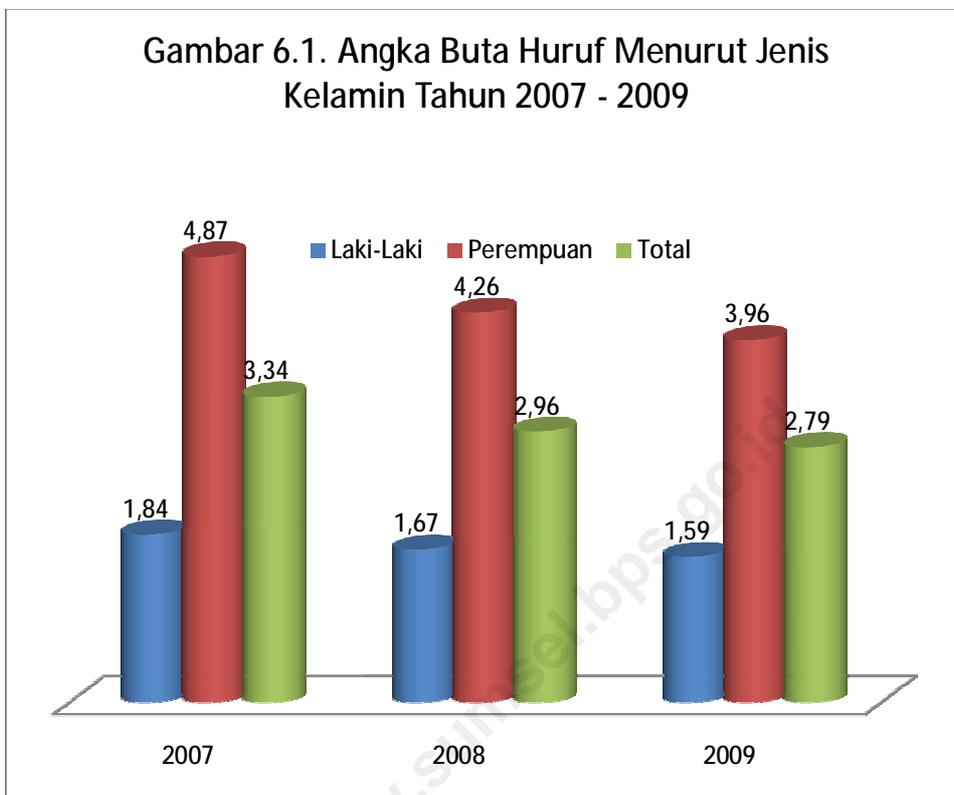
Menurut jenis kelamin, angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2009 sebesar 98,41 persen lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yang besarnya 96,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita masih sedikit tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Kondisi ini juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Tabel 6.2). Kesenjangan gender yang terbesar terjadi di Kabupaten OKU Timur, Musi Rawas dan Empat Lawang, sedangkan kesenjangan gender yang paling kecil dapat dijumpai di Kabupaten Ogan Komering Ulu, OKU Selatan, Kota Pagaralam, Palembang dan Ogan Komering Ilir.

Tabel 6.2 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	98,96	97,91	98,43
(02) Ogan Komering Ilir	96,08	94,37	95,24
(03) Muara Enim	99,06	97,52	98,81
(04) Lahat	98,93	96,21	97,59
(05) Musi Rawas	98,31	94,63	96,51
(06) Musi Banyuasin	97,82	95,30	96,54
(07) Banyuasin	97,68	94,91	96,24
(08) OKU Selatan	98,51	97,04	97,80
(09) OKU Timur	96,90	92,40	94,67
(10) Ogan Ilir	98,56	96,52	97,47
(11) Empat Lawang	98,76	95,75	97,28
(71) Palembang	99,56	97,92	98,69
(72) Prabumulih	99,64	97,72	98,66
(73) Pagar Alam	99,06	97,43	98,24
(74) Lubuk Linggau	99,33	97,39	98,33
Sumatera Selatan	98,41	96,04	97,21

Sumber: BPS; Susenas 2009

Gambar 6.1. Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin Tahun 2007 - 2009



## 6.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Di tingkat provinsi rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2009 baru mencapai 7,66 tahun berarti rata-rata baru sampai taraf pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada kelas dua. Dari sisi perbedaan jenis kelamin juga masih ditemui adanya kesenjangan gender di mana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 7,92 tahun dan perempuan 7,39

tahun (Tabel 6.3). Meskipun demikian, hal yang perlu dicatat adalah bahwa jika diamati kesenjangan gender tersebut cenderung menurun periode 2007 – 2009.

Tabel 6.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2006 – 2009

Jenis Kelamin	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	7,83	7,83	7,92
Perempuan	7,36	7,36	7,39
Total	7,60	7,60	7,66

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2009

Untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Palembang yang mencapai 9,95 tahun, dengan penduduk laki-laki rata-rata 10,27 tahun dan perempuan rata-rata 9,66 tahun (Tabel 6.4). Ini berarti penduduk laki-laki rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai SLTA kelas dua, sedangkan penduduk perempuan secara rata-rata baru menamatkan tingkat SLTA kelas satu. Rata-rata lama sekolah terpendek terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu baru 6,73 tahun atau setara tamat Sekolah Dasar, di mana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 6,97 tahun dan perempuan 6,48 tahun. Demikian juga di Kabupaten Musi Banyuasin (7,05 tahun), di mana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki setara kelas 1 SLTP dan perempuan hanya setara kelas 6 SD (laki-laki 7,28 tahun dan perempuan 6,81 tahun).

Tabel 6.4 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009

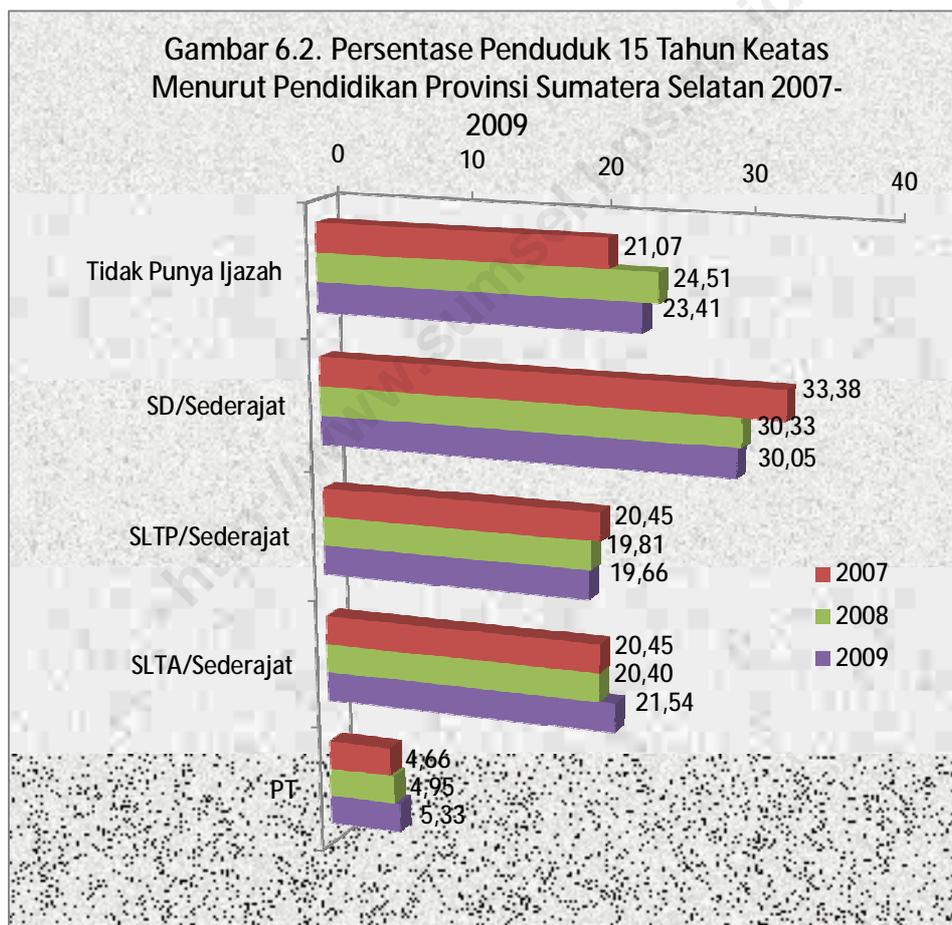
Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	7,85	7,49	7,71
(02) Ogan Komering Ilir	6,97	6,48	6,73
(03) Muara Enim	7,73	6,96	7,35
(04) Lahat	7,94	7,40	7,72
(05) Musi Rawas	7,38	6,70	7,05
(06) Musi Banyuasin	7,28	6,81	7,05
(07) Banyuasin	7,32	6,72	7,01
(08) OKU Selatan	7,44	6,83	7,15
(09) OKU Timur	7,10	6,59	6,87
(10) Ogan Ilir	7,85	7,21	7,52
(11) Empat Lawang	7,23	6,63	6,94
(71) Palembang	10,27	9,66	9,95
(72) Prabumulih	9,29	8,66	9,00
(73) Pagar Alam	8,64	8,38	8,54
(74) Lubuk Linggau	9,34	8,82	9,11
Sumatera Selatan	7,92	7,39	7,66

Sumber: BPS; Susenas 2009

### 6.3. Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Selama periode 2007-2009 penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang Diploma I/II sampai tingkat S2/S3 cenderung mengalami peningkatan.

Sebaliknya jenjang pendidikan SD ke bawah cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan penduduk Sumatera Selatan pada periode 2007 – 2009 meskipun cukup kecil. Pada tahun 2009 penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan Perguruan Tinggi sudah mencapai 5,33 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,95 persen dan tahun 2007 yaitu sebesar 4,66. Sebaliknya pada jenjang pendidikan SD ke bawah terjadi penurunan dibandingkan tahun 2007 maupun tahun 2008.



Sumber: BPS, Susenas 2007 – 2009

Tabel 6.5 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2009

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan					Total
	Tidak Punya Ijazah	SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	16.75	25.11	21.65	29.24	7.25	100
(02) Ogan Komering Ilir	34.22	30.42	20.04	12.91	2.41	100
(03) Muara Enim	26.09	33.69	20.91	16.70	2.61	100
(04) Lahat	21.21	25.43	19.86	24.00	9.50	100
(05) Musi Rawas	27.26	38.61	18.60	13.12	2.41	100
(06) Musi Banyuasin	27.57	35.56	19.45	15.00	2.42	100
(07) Banyuasin	22.54	39.69	18.49	16.69	2.59	100
(08) OKU Selatan	25.26	39.81	20.09	13.17	1.67	100
(09) OKU Timur	28.41	37.18	18.46	13.26	2.69	100
(10) Ogan Ilir	27.00	34.34	17.91	16.73	4.03	100
(11) Empat Lawang	27.64	33.29	21.39	15.95	1.73	100
(71) Palembang	15.57	16.16	19.46	37.19	11.62	100
(72) Prabumulih	11.54	19.83	21.80	35.94	10.89	100
(73) Pagar Alam	15.83	23.59	21.94	30.82	7.83	100
(74) Lubuk Linggau	13.95	21.18	22.60	33.19	9.07	100
Sumatera Selatan	23.41	30.05	19.66	21.54	5.33	100

Sumber: BPS; Susenas 2009

Menurut kabupaten/kota, tingkat pendidikan penduduk yang rendah ditemui di Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan Musi Rawas, di mana pada ketiga daerah ini persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah paling tinggi (sekitar 65 persen). Sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi ditemui di Kota Palembang, Prabumulih dan

Lubuklinggau, di mana pada kedua daerah ini persentase penduduk yang berpendidikan PT di atas 8 persen.

#### 6.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Tetapi kelemahannya, APS tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/menikmati pendidikan.

Tabel 6.6 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur dan Daerah Tempat Tinggal, 2007 – 2009

Umur	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	97,43	97,79	97,80
13 – 15	83,85	83,21	84,65
16 – 18	53,49	52,12	54,10
19 – 24	11,06	9,71	11,55

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2009

Tabel 6.6 menunjukkan semakin tinggi umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD) pada tahun 2009 telah mencapai 97,80 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SLTP), angka partisipasi sekolah lebih kecil (84,65 persen) dan pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah hanya sebesar 54,10 persen. Ini berarti bahwa masih ada 13,15 persen penduduk usia 13 – 15 yang tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP dan 30,55 persen penduduk usia 16 – 18 yang tidak melanjutkan pendidikan ke SLTA (Tabel 6.7.).

Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok umur per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 6.7. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun yang terendah dijumpai di kabupaten Banyuasin (95,04 persen) dan Empat Lawang (95,65 persen), sedangkan tertinggi di Kota Pagaralam (99,75 persen) dan Kota Palembang (99,70 persen). Pada usia 13-15 tahun partisipasi sekolah yang paling rendah ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir (73,57 persen) dan OKU Selatan (77,04 persen), sedangkan yang tertinggi berada di Kota Pagaralam (96,98 persen) dan Kota Prabumulih (95,93 persen). Untuk kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah terendah adalah di Kabupaten Musi Rawas (34,29 persen), Ogan Komering Ilir (42,05 persen) dan Banyuasin (42,50 %) sedangkan tertinggi adalah di Kota Prabumulih (68,24 persen).

Tabel 6.7 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Umur, 2009

Kabupaten/Kota	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	99.39	88.75	63.33
(02) Ogan Komering Ilir	97.00	73.57	42.05
(03) Muara Enim	98.19	83.16	45.50
(04) Lahat	99.40	89.68	63.41
(05) Musi Rawas	96.81	86.41	34.29
(06) Musi Banyuasin	98.69	87.97	51.29
(07) Banyuasin	95.04	82.31	42.50
(08) OKU Selatan	97.81	77.04	50.10
(09) OKU Timur	97.76	85.48	59.81
(10) Ogan Ilir	96.25	80.96	52.72
(11) Empat Lawang	95.65	83.34	65.01
(71) Palembang	99.70	89.29	65.77
(72) Prabumulih	99.43	95.93	68.24
(73) Pagar Alam	99.75	96.98	59.35
(74) Lubuk Linggau	98.63	90.32	61.86
Sumatera Selatan	97.80	84.65	54.10

Sumber: BPS; Susenas 2009

Lebih jauh tentang partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni yaitu tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Angka Partisipasi Murni (APM) mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). Tetapi APM memiliki kelemahan tidak dapat menggambarkan anak yang sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5 – 6 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah di SD/Sederajat.

Tabel 6.8 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, 2007 – 2009

Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	92,69	92,96	93,60
SLTP	64,97	65,59	65,88
SLTA	42,62	42,84	43,00

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2009

Inpres no 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPWBA) mempunyai target: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat minimal 95 persen pada akhir tahun 2008; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat minimal 95 Persen akhir tahun 2008; serta persentase buta aksara 15 tahun ke atas maksimum 5 persen pada akhir tahun 2009.

Dikaitkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, angka pada Tabel 6.8 memberikan informasi bahwa program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena angka partisipasi murni di tingkat SLTP hanya sebesar 65,88 persen.

Dilihat per kabupaten/kota, angka partisipasi murni jenjang SLTP ini hampir semua kabupaten/kota masih cukup rendah. Angka yang terendah terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Lahat (Tabel 6.9.).

Tabel 6.9 Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2009

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	96,35	61,84	51,08
(02) Ogan Komering Ilir	94,90	54,05	34,70
(03) Muara Enim	95,80	60,66	36,78
(04) Lahat	95,78	80,01	57,87
(05) Musi Rawas	90,45	77,15	27,87
(06) Musi Banyuasin	89,87	75,61	41,33
(07) Banyuasin	89,22	71,55	32,31
(08) OKU Selatan	96,27	68,36	33,24
(09) OKU Timur	95,25	79,58	42,68
(10) Ogan Ilir	92,64	56,25	35,46
(11) Empat Lawang	94,69	75,43	44,17
(71) Palembang	94,24	57,65	55,69
(72) Prabumulih	96,14	66,66	58,37
(73) Pagar Alam	96,07	69,24	53,31
(74) Lubuk Linggau	95,65	61,59	46,05
Sumatera Selatan	93,60	65,88	43,00

Sumber: BPS; Susenas 2008

#### 6.5. Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana

pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil, dan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak untuk di tempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Perkembangan daya dukung fasilitas pendidikan selama empat tahun terakhir disajikan pada Tabel 6.10 berupa jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah siswa. Jumlah sekolah dalam empat tahun terakhir terus meningkat untuk mengimbangi jumlah siswa yang juga cenderung meningkat baik jenjang SD, SLTP maupun SLTA. Demikian juga jumlah guru terus meningkat dari tahun ajaran 2006/2007 sampai tahun ajaran 2009/2010.

Tingkat kecukupan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat melalui rasio siswa terhadap jumlah sekolah dan rasio siswa terhadap jumlah guru. Dari Tabel 6.10. rasio siswa sekolah secara umum mengalami penurunan dari tahun ajaran 2006/2007 s.d. 2008/2009 tetapi kemudian sedikit meningkat pada tahun 2009/2010. Pada tahun ajaran 2009/2010, rata-rata 1 sekolah setingkat SD menampung sebanyak 206 orang siswa, 1 sekolah setingkat SLTP rata-rata menampung 243 orang siswa dan 1 sekolah setingkat SLTA rata-rata menampung sebanyak 308 orang siswa.

Rasio siswa-guru cenderung menurun sejalan dengan terus bertambahnya jumlah guru. Pada jenjang SD, pada tahun 2009/2010 satu orang guru mengawasi secara rata-rata 15 orang siswa, sedangkan pada jenjang SLTP rata-rata seorang guru mengawasi 12 orang siswa dan pada jenjang SLTA seorang guru mengawasi rata-rata 13 orang siswa.

Tabel 6.10 Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Siswa, Rasio Siswa-Sekolah dan Rasio Siswa-Guru Menurut Jenjang Pendidikan , 2006/2007 – 2009/2010

Jenjang Pendidikan	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jumlah Sekolah</b>				
SD	4.660	4.770	4.882	5.032
SLTP	1.307	1.395	1.542	1.571
SLTA	682	762	863	901
<b>Jumlah Guru</b>				
SD	55.980	60.128	62.280	67.956
SLTP	20.449	22.543	23.687	30.867
SLTA	14.209	13.709	16.109	21.105
<b>Jumlah Siswa</b>				
SD	994.583	1.006.583	991.079	1.038.510
SLTP	323.756	344.756	358.202	382.439
SLTA	223.348	235.348	254.348	277.421
<b>Rasio Siswa-Sekolah</b>				
SD	213,43	211,02	203,01	206,38
SLTP	247,71	247,14	232,30	243,44
SLTA	327,49	308,86	294,73	307,90
<b>Rasio Siswa-Guru</b>				
SD	17,77	16,74	15,91	15,28
SLTP	15,83	15,29	15,12	12,39
SLTA	15,72	17,17	15,79	13,14

Sumber: Ikhtisar Data Pokok Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB VII

### KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat dalam lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah usia 15 tahun atau lebih. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2009, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja tercatat sebanyak 5 juta jiwa.

#### 7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi angka TPAK.

Tabel 7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009

Jenis Kelamin	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	84,15	85,35	84,58
Perempuan	54,02	54,06	51,88
Laki-laki + Perempuan	69,03	69,79	68,31

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2007, Agustus 2008 dan Agustus 2009

Data Sakernas Agustus 2009 menunjukkan bahwa TPAK mencapai 68,31 persen. TPAK berbeda menurut jenis kelamin, di mana laki-laki mempunyai TPAK yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah dirinya maupun keluarganya. TPAK wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan wanita, terbukanya kesempatan kerja bagi wanita, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah dan sebagainya.

Tabel 7.2 menyajikan TPAK menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Sumatera Selatan tahun 2009. TPAK yang rendah umumnya dijumpai di daerah-daerah perkotaan seperti Palembang dan Lubuklinggau. Bisa dipahami, di daerah perkotaan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia kerja cukup tinggi sehingga belum terjun ke dunia kerja. Sedangkan di daerah pedesaan, karena tuntutan ekonomi, penduduk usia kerja yang tidak sanggup melanjutkan pendidikan terpaksa harus memasuki dunia kerja meskipun sebagai pekerja keluarga. Tabel 7.2 juga

menunjukkan bahwa diferensiasi TPAK menurut jenis kelamin terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Tabel 7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	83.44	46.57	66.21
(02) Ogan Komering Ilir	86.26	46.58	67.45
(03) Muara Enim	84.73	55.64	70.42
(04) Lahat	82.32	58.29	70.71
(05) Musi Rawas	88.59	56.46	73.48
(06) Musi Banyuasin	85.88	55.27	71.10
(07) Banyuasin	85.18	48.42	67.16
(08) OKU Selatan	89.27	71.33	80.89
(09) OKU Timur	85.42	48.65	68.30
(10) Ogan Ilir	85.40	66.68	76.28
(11) Empat Lawang	82.31	52.94	67.77
(71) Palembang	81.49	46.91	62.42
(72) Prabumulih	82.50	49.67	64.77
(73) Pagar Alam	83.41	50.90	67.32
(74) Lubuk Linggau	79.55	43.38	60.24
Sumatera Selatan	84.58	51.88	68.31

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2009

## 7.2. Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT)

Merupakan suatu hal yang umum, bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan

tenaga kerja karena terbatasnya lapangan kerja yang ada. Sebagai akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran.

Pengangguran merupakan persoalan yang dilematis, di mana pemerintah atau instansi yang mengurus ketenagakerjaan sebenarnya mampu mengurangi atau menekan angka pengangguran tapi ketika terjadi proses penekanan angka pengangguran maka akan terjadi implikasi lainnya di sektor ekonomi. Implikasi ini dapat terjadi akibat dari perubahan-perubahan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan teori ekonomi menyatakan bahwa jika perekonomian berada dibawah *full employment*, maka pendapatan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pada pengeluaran pemerintah, atau dengan menurunkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usaha untuk menekan pengangguran mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak yang diterima oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan di setiap negara maju mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur. Dan bagi negara yang masih berkembang, pengangguran merupakan persoalan yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Dan akhirnya pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi.

Tabel 7.3 menunjukkan bahwa pada periode 2007 – 2009 tingkat pengangguran terbuka terus menurun dari 9,34 persen pada tahun 2007 menjadi 8,08 persen pada tahun 2008 dan 7,61 persen pada Agustus 2009. Penurunan angka pengangguran tentu saja menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi di Sumatera Selatan. Pengangguran yang menurun berarti adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat di Sumatera Selatan.

Tabel 7.3 Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009

Jenis Kelamin	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	8,86	7,70	7.68
Perempuan	10,07	8,69	7.50
Laki-laki + Perempuan	9,34	8,08	7.61

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2007, Agustus 2008 dan Agustus 2009

Tingkat pengangguran di Sumatera Selatan mempunyai ciri bahwa TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Diduga, di daerah perdesaan karena didominasi oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi. Penduduk usia kerja dengan mudah dapat bekerja di sektor pertanian meskipun sebagai pekerja keluarga atau pekerja bebas (buruh tani) karena tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan yang tinggi. Sebaliknya di daerah perkotaan, lapangan pekerjaan formal lebih selektif dalam menerima tenaga kerja khususnya dengan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. Ciri lain adalah bahwa TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini bisa dijelaskan bahwa kesempatan kerja perempuan cenderung lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Selain itu, pada momen-momen tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan perempuan, sehingga angka pengangguran wanita menjadi tinggi.

Tingkat pengangguran dirinci menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 7.4. Dua ciri pengangguran yang disebutkan di atas terlihat juga mendominasi pola pengangguran di kabupaten/kota, di mana pengangguran

laki-laki lebih tinggi di hampir semua kabupaten/kota kecuali di Lubuklinggau, OKI, OKU Timur, OKU Selatan dan Banyuasin di mana pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Demikian juga tingkat pengangguran yang tinggi dijumpai di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam dan Lubuklinggau.

Tabel 7.4 Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	7.74	6.37	7.29
(02) Ogan Komering Ilir	6.63	7.87	7.04
(03) Muara Enim	5.71	4.93	5.40
(04) Lahat	5.48	2.88	4.44
(05) Musi Rawas	3.10	1.84	2.64
(06) Musi Banyuasin	6.68	6.99	6.79
(07) Banyuasin	4.92	5.47	5.11
(08) OKU Selatan	2.61	4.93	3.56
(09) OKU Timur	4.39	7.77	5.51
(10) Ogan Ilir	3.17	2.45	2.87
(11) Empat Lawang	7.16	7.56	7.32
(71) Palembang	17.70	13.05	15.78
(72) Prabumulih	10.74	12.50	11.47
(73) Pagar Alam	10.41	12.97	11.37
(74) Lubuk Linggau	8.05	16.36	11.24
Sumatera Selatan	7.68	7.50	7.61

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2009

Tabel 7.5 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan cenderung merendah untuk mereka yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2009, tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang berpendidikan SLTA mencapai 15,47 persen sedangkan untuk yang berpendidikan >SLTA TPT sebesar 17,73 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang tamat sekolah dasar hanyalah 3,73 persen, sedangkan untuk mereka yang tidak/belum pernah sekolah adalah 2,56 persen. Dibandingkan tahun 2008, ada kecenderungan meningkatnya TPT untuk pendidikan di atas SLTA.

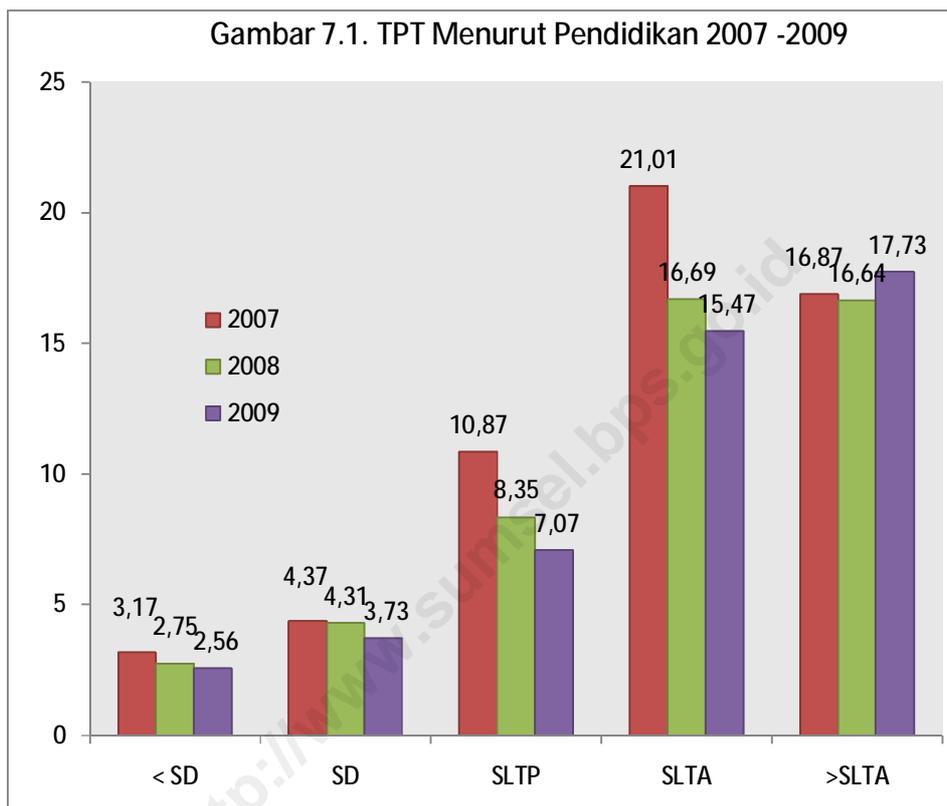
Tabel 7.5 Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, 2007 – 2009

Pendidikan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
< SD	3,17	2,75	2.56
SD	4,37	4,31	3.73
SLTP	10,87	8,35	7.07
SLTA	21,01	16,69	15.47
>SLTA	16,87	16,64	17.73

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2007, Agustus 2008 dan Agustus 2009

Angka pada Tabel 7.5 di atas menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran terdidik di Sumatera Selatan. Masalah ini sebenarnya terjadi sudah sejak lama dan sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang tepat.

Pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menginginkan pekerjaan di sektor formal padahal sektor ini mempunyai daya tampung yang sangat terbatas. Tidak dapat dielakkan, tingkat pengangguran terdidik menjadi sangat tinggi.



### 7.3. Lapangan Usaha Utama

Data tentang distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan juga sebagai tolok ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Tahapan kemajuan perekonomian suatu negara dari tradisional menuju negara industri, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi

sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier. Sehingga, persentase tenaga kerja di sektor primer akan menurun dan sebaliknya pada sektor sekunder dan tersier akan meningkat.

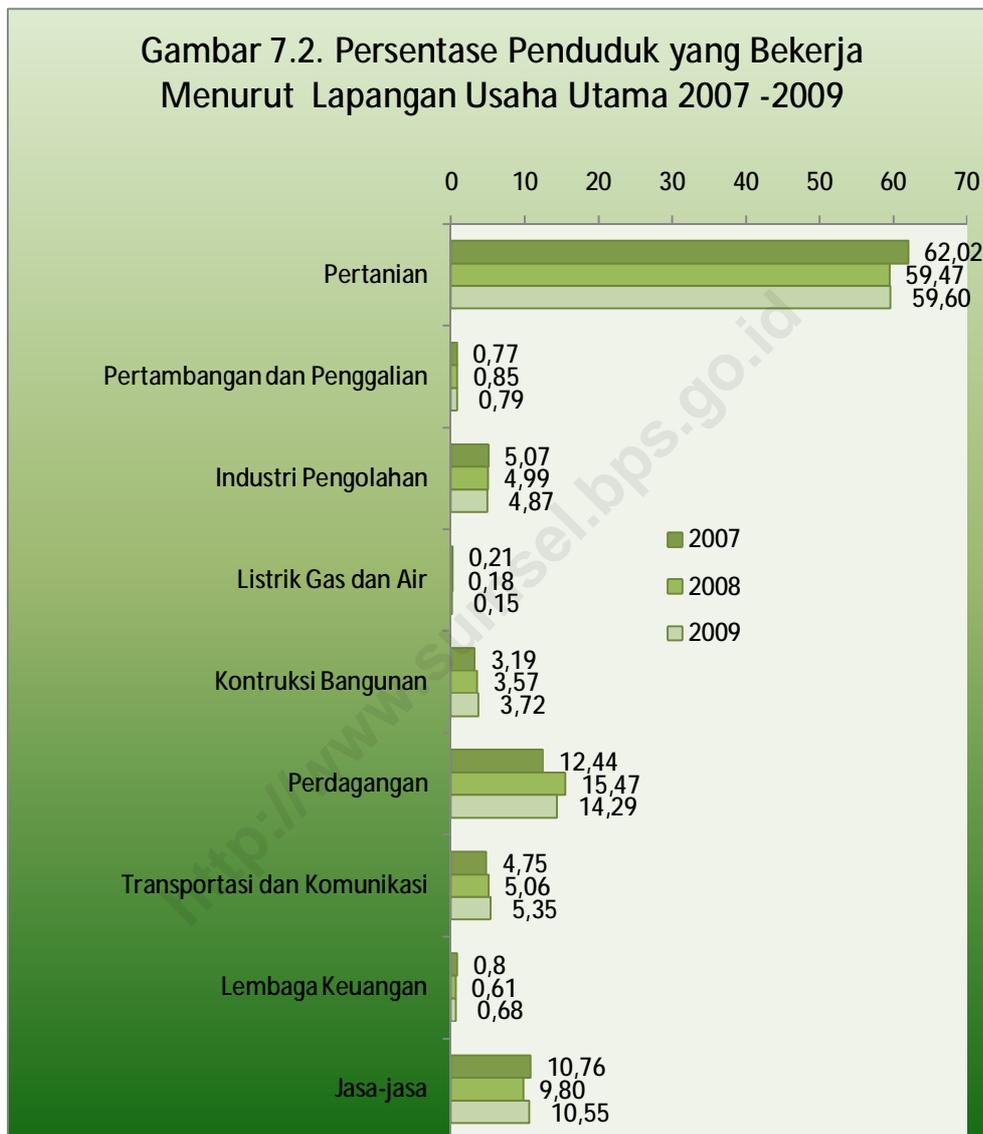
Tabel 7.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2007 – 2009

Lapangan Usaha Utama	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	62,02	59,47	59,60
Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,85	0,79
Industri Pengolahan	5,07	4,99	4,87
Listrik Gas dan Air	0,21	0,18	0,15
Konstruksi Bangunan	3,19	3,57	3,72
Perdagangan	12,44	15,47	14,29
Transportasi dan Komunikasi	4,75	5,06	5,35
Lembaga Keuangan	0,80	0,61	0,68
Jasa-jasa	10,76	9,80	10,55

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2007, Agustus 2008 dan Agustus 2009

Sumatera Selatan masih tergolong sebagai daerah agraris, hal ini karena sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) relatif masih dominan. Tabel 7.6 di atas menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi pada tahun 2009 (59,60 persen) meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun 2007. Setelah sektor pertanian, sektor yang cukup banyak

menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Distribusi ini tidak banyak berbeda dibandingkan tahun 2007 dan 2008.



Tabel 7.7 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Utama, 2009

Kabupaten/Kota	A	M	S	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	61.76	7.13	31.11	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	77.66	7.65	14.69	100,00
(03) Muara Enim	71.42	5.80	22.78	100,00
(04) Lahat	66.83	9.57	23.61	100,00
(05) Musi Rawas	76.35	3.78	19.87	100,00
(06) Musi Banyuasin	76.36	5.30	18.33	100,00
(07) Banyuasin	76.75	8.70	14.56	100,00
(08) OKU Selatan	83.44	0.80	15.76	100,00
(09) OKU Timur	74.64	9.77	15.58	100,00
(10) Ogan Ilir	62.72	14.65	22.63	100,00
(11) Empat Lawang	74.32	3.03	22.65	100,00
(71) Palembang	3.60	19.36	77.04	100,00
(72) Prabumulih	38.71	13.45	47.83	100,00
(73) Pagar Alam	60.25	6.21	33.54	100,00
(74) Lubuk Linggau	23.18	12.50	64.32	100,00
Sumatera Selatan	59.60	9.53	30.87	100,00

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2009

Dilihat menurut kabupaten/kota, daerah-daerah yang mempunyai penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian paling tinggi pada tahun 2009 adalah Kabupaten OKU Selatan, OKI, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin (di atas 75 persen). Di Kota Palembang, tenaga kerja sebagian besar terserap di sektor

jasa-jasa (S) yaitu mencapai 77,04 persen. Di Kota Prabumulih dan Lubuklinggau meskipun sektor jasa-jasa (S) mempunyai penyerapan tenaga kerja tertinggi, tetapi sektor pertanian masih cukup besar, sebaliknya di Kota Pagaralam, sektor pertanian masih lebih tinggi penyerapannya dibandingkan sektor jasa-jasa (Tabel 7.7).

#### 7.4. Status Pekerjaan

Tabel 7.8 di atas menyajikan distribusi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan. Data hasil Sakernas 2007, 2008 dan 2009 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai buruh/karyawan menurun dari 24,89 persen pada tahun 2007 menjadi 22,44 persen pada tahun 2008 dan sedikit meningkat menjadi 22,73 persen pada tahun 2009. Sebaliknya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan cara berusaha baik berusaha sendiri, dibantu oleh pekerja tak dibayar maupun dibayar menurun pada tahun 2007 dan kemudian meningkat pada tahun 2008. Sedangkan, untuk mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal masih sangat mendominasi struktur ketenagakerjaan Sumatera Selatan.

Tabel 7.8 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, 2007 – 2009

Status Pekerjaan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Berusaha sendiri	15,50	17,72	19,83
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	25,32	25,03	23,93
3. Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	1,47	1,85	1,98
4. Buruh/karyawan	24,89	22,44	22,73
5. Pekerja bebas pertanian	5,78	6,21	3,56
6. Pekerja bebas non pertanian	2,19	2,61	2,00
7. Pekerja tak dibayar	24,84	24,15	25,97

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2007, Agustus 2008 dan Agustus 2009

Menurut Kabupaten/Kota, umumnya ditemui pola yang mirip dengan provinsi di mana didominasi oleh berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Ada kecenderungan bahwa di daerah perkotaan pekerja dengan status buruh/karyawan cukup tinggi seperti di Kota Palembang, Lubuklinggau dan Prabumulih, sedangkan di daerah pedesaan yang paling tinggi adalah status pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga sebagaimana ditemui misalnya di OKU Selatan, OKI, Banyuasin, Lahat dan Musi Banyuasin.

Tabel 7.9 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2009

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(01) Ogan Komering Ulu	20.16	22.31	2.01	27.55	0.99	0.68	26.29
(02) Ogan Komering Ilir	18.10	29.94	1.89	11.94	3.38	0.73	34.04
(03) Muara Enim	17.14	29.16	1.08	20.34	4.36	1.10	26.82
(04) Lahat	16.13	31.37	0.70	13.34	4.50	3.10	30.86
(05) Musi Rawas	19.91	22.99	1.99	22.41	3.63	0.81	28.26
(06) Musi Banyuasin	15.44	24.26	2.89	21.83	4.19	1.39	30.00
(07) Banyuasin	17.32	25.76	0.74	18.23	2.09	2.46	33.41
(08) OKU Selatan	6.85	35.39	2.03	7.57	2.34	0.79	45.01
(09) OKU Timur	15.11	30.99	1.72	11.24	10.78	3.67	26.49
(10) Ogan Ilir	23.92	23.37	2.60	17.63	2.46	1.80	28.23
(11) Empat Lawang	14.81	36.23	0.99	9.13	6.21	3.62	29.02
(71) Palembang	30.26	9.20	3.06	46.91	0.23	2.80	7.53
(72) Prabumulih	26.08	10.91	2.29	29.09	12.40	1.01	18.21
(73) Pagar Alam	23.24	22.41	2.64	22.37	1.96	2.97	24.41
(74) Lubuk Linggau	30.67	9.82	3.20	40.99	3.34	4.26	7.71
Sumatera Selatan	19.83	23.93	1.98	22.73	3.56	2.00	25.97

Catatan:

- 1 Berusaha sendiri
- 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
- 3 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- 4 Buruh/karyawan/pegawai
- 5 Pekerja bebas di pertanian
- 6 Pekerja bebas di non pertanian
- 7 Pekerja keluarga/tak dibayar

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2009

### 7.5. Jumlah Jam Kerja

Aspek lain dari ketenagakerjaan adalah pemanfaatan tenaga kerja yang umumnya diukur dengan jam kerja. Isu jam kerja ini biasanya dihubungkan dengan setengah pengangguran atau pengangguran terselubung, artinya bahwa penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) dianggap setengah menganggur karena dianggap belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Lebih dari sepertiga (41,57 persen) pekerja di Sumatera Selatan bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu 35 jam seminggu. Angka ini cukup besar, dan tentu saja mengindikasikan adanya tingkat setengah pengangguran yang cukup besar. Jika pengangguran terbuka dan setengah pengangguran ini digabungkan, maka akan diperoleh angka yang cukup besar, mencapai hampir separuh dari angkatan kerja.

Tabel 7.10. Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2009

Jenis Kelamin	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	35,50	37,48	36,13
Perempuan	50,90	48,69	50,52
Total	41,50	41,77	41,57

Sumber: BPS; Sakemas, Agustus 2007, Agustus 2008 dan Agustus 2009

Pada periode 2007 – 2009 persentase penduduk perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih tinggi dibandingkan laki-laki . Tabel 7.10 juga menunjukkan bahwa selama tahun 2007-2009 proporsi penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu juga tidak banyak berubah, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 7.11 Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2009

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	53.33	59.47	55.37
(02) Ogan Komering Ilir	48.13	54.91	50.33
(03) Muara Enim	42.14	55.66	47.42
(04) Lahat	45.49	59.75	51.26
(05) Musi Rawas	54.33	67.74	59.21
(06) Musi Banyuasin	41.81	53.92	46.34
(07) Banyuasin	31.12	48.43	37.22
(08) OKU Selatan	39.42	60.55	48.00
(09) OKU Timur	39.89	57.11	45.47
(10) Ogan Ilir	33.23	43.53	37.63
(11) Empat Lawang	37.61	61.49	46.82
(71) Palembang	11.12	34.09	20.95
(72) Prabumulih	26.41	43.05	33.22
(73) Pagar Alam	27.84	44.23	33.86
(74) Lubuk Linggau	23.26	33.57	27.00
Sumatera Selatan	36.13	50.52	41.57

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2008

Tabel 7.11 menyajikan persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin. Persentase tertinggi dijumpai di Musi Rawas, OKU, Lahat dan OKI, sedangkan yang paling rendah dijumpai di daerah perkotaan seperti Palembang, Lubuklinggau, Prabumulih dan Pagaralam. Untuk semua kabupaten/kota persentase penduduk perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

<http://www.sumsel.bps.go.id>

<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB VIII

### TARAF DAN POLA KONSUMSI

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan kemampuan ekonomi khususnya pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya kemampuan ekonomi penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan (dalam hal ini didekati dengan data pengeluaran), akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga di ungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

#### 8.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count ratio* ( $P_0$ ). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ ) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ ). Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ ) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ ). Penurunan pada  $P_1$  mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada  $P_2$  mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 8.1 Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator, 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Penduduk Miskin	1.331,8	1.254,3	1.167,8
Persentase Penduduk Miskin	19,15	17,67	16,28
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )	3,84	3,92	3,06
Indeks Keparahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> )	1,14	1,14	0,86
Garis Kemiskinan	178.209	210.893	212.381

Sumber: BPS Sumatera Selatan

Di tingkat Provinsi Sumatera Selatan, jumlah penduduk miskin menurun dari 1,332 juta jiwa pada tahun 2007 menjadi 1,167 juta jiwa pada tahun 2009, atau berkurang sekitar 0,164 juta jiwa. Dalam hal persentase penduduk miskin ( $P_0$ ), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 19,15 persen pada tahun 2007 menjadi 16,28 persen pada tahun 2009.

Dilihat dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan ( $P_1$  dan  $P_2$ ), insiden kemiskinan pada tahun 2009 dapat disebutkan sebagai berikut. Selama periode 2007 – 2009, indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) sedikit menurun dari 3,84 menjadi 3,06. Pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) juga turun dari 1,14 menjadi 0,86. Ini berarti bahwa periode 2007 – 2009, baik dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin berkurang, maupun dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun dalam periode tersebut.

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga dalam

pelaksanaan pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama. Dalam Propenas 2004 – 2009 bahkan telah ditargetkan bahwa persentase penduduk miskin akan dapat diturunkan menjadi sekitar 14 persen pada tahun 2009. Guna dapat memenuhi target tersebut, penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Program utama yang dicanangkan untuk itu meliputi penyediaan kebutuhan pokok utama keluarga miskin dan pengembangan budaya usaha masyarakat miskin. Namun mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi, maka dalam menanggulangi kemiskinan dibutuhkan strategi penanggulangan yang komprehensif yang meliputi kebijakan makro dan lintas sektor.

## 8.2. Taraf Konsumsi Energi dan Protein

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap komoditas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap komoditas makanan tersebut. Kecukupan energi dan protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 masing-masing sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein.

Pada tahun 2007, besarnya rata-rata konsumsi energi masyarakat Sumatera Selatan sebesar 2.058,2 kkal per kapita per hari, sudah di atas standar kecukupan gizi menurut WNPG VIII. Demikian juga rata-rata konsumsi protein pada tahun 2007 telah melebihi standar kecukupan menurut WNPG VIII yaitu 58,21 gram

per kapita per hari. Pada tahun 2009, angka konsumsi kalori maupun protein turun menjadi 1.991,8 kkal per kapita per hari dan 53,62 gram protein per kapita per hari.

Tabel 8.2 Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)	2.058,2	2.106,4	1.991,8
Protein (gram)	58,21	56,86	53,62

Sumber: diolah dari Susenas Panel 2007-2009

### 8.3. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Tabel 8.3 menunjukkan bahwa pada periode 2007 – 2009 secara rata-rata pendapatan penduduk Sumatera Selatan meningkat. Peningkatan pendapatan ini menyebabkan meningkatnya kemampuan daya beli penduduk dan akibatnya secara rata-rata konsumsi (pengeluaran) penduduk juga meingkat. Pengeluaran per kapita selama periode 2007 – 2009 meningkat rata-rata sekitar 9,51 persen per tahun.

Tabel 8.3 Beberapa Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan Per Kapita Harga Konstan 2000 (000/Tahun)	6.623,8	6.860,3	7.041,9
Indeks Daya Beli (000)	617,59	623,48	628,30
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Sebulan (Rp) <sup>*)</sup>	329.688	361.314	392.374

Sumber: BPS, dari berbagai Publikasi

Catatan:

\*) Angka dari Susenas Panel Maret 2007, 2008 dan 2009

#### 8.4. Perkembangan Distribusi Pendapatan

Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Terdapat dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator pertama adalah indikator yang

dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang di golongkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh  $< 12$  persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi,
- b. memperoleh  $12 - 17$  persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang,
- c. memperoleh  $> 17$  persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, terlihat selama periode 2007 – 2009 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Sumatera Selatan tergolong rendah. Hal ini tampak dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah angkanya selalu di atas 20 persen. Persentase pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terendah pada tahun 2007 adalah 21,33 persen, kemudian naik menjadi 21,48 persen pada tahun 2008 dan kembali naik menjadi 21,55 persen pada tahun 2009.

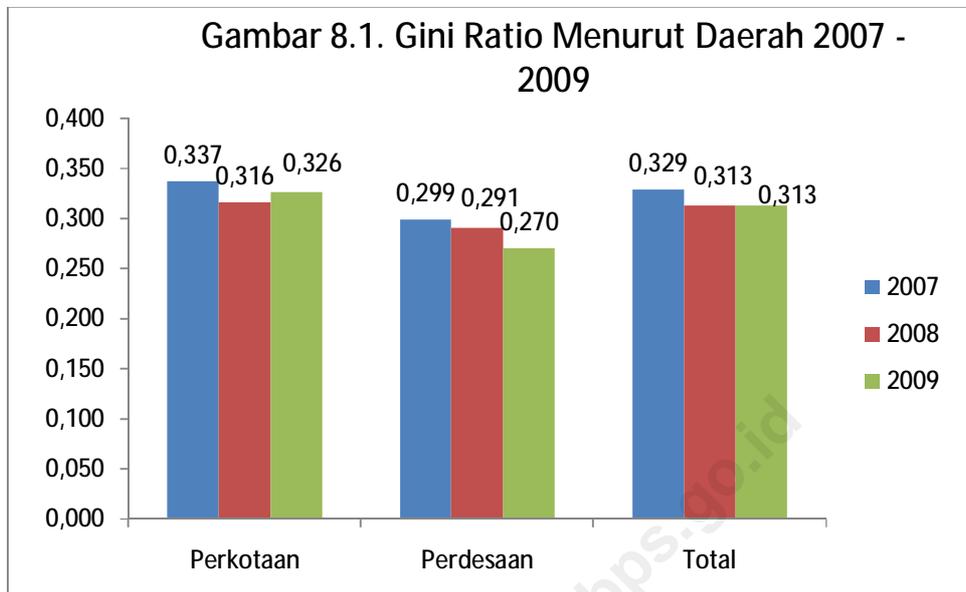
Tabel 8.4. Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
40 persen terendah	21,33	21,48	21,55
40 persen menengah	37,66	37,98	37,94
20 tertinggi	41,00	40,54	40,51
Gini Ratio	0,329	0,313	0,313

Catatan: Angka tahun 2008 merupakan angka revisi

Sumber: BPS Sumatera Selatan, dihitung dari Susenas Panel 2007, 2008 dan 2009

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia dapat juga dipergunakan indikator yang lain, yaitu *Gini Ratio*. *Gini Ratio* tersebut juga dihitung dengan memanfaatkan data pengeluaran. Nilai dari *Gini Ratio* berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Berdasarkan *gini ratio*, pada periode 2007 – 2009 secara keseluruhan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh menurunnya *gini ratio* dari 0,329 pada tahun 2007 menjadi 0,313 pada tahun 2008 dan 0,313 pada tahun 2009. Bila dikaitkan dengan bahasan sebelumnya, tampak bahwa selama periode 2007 – 2009 terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang juga diikuti dengan penurunan ketimpangan pengeluaran.



Catatan: Angka tahun 2008 merupakan angka revisi

### 8.5. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat di pakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya

digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 8.5. Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2009

Indikator	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	53,83	54,80	56,46
Non Makanan	46,17	45,20	43,54
Total	100,00	100,00	100,00

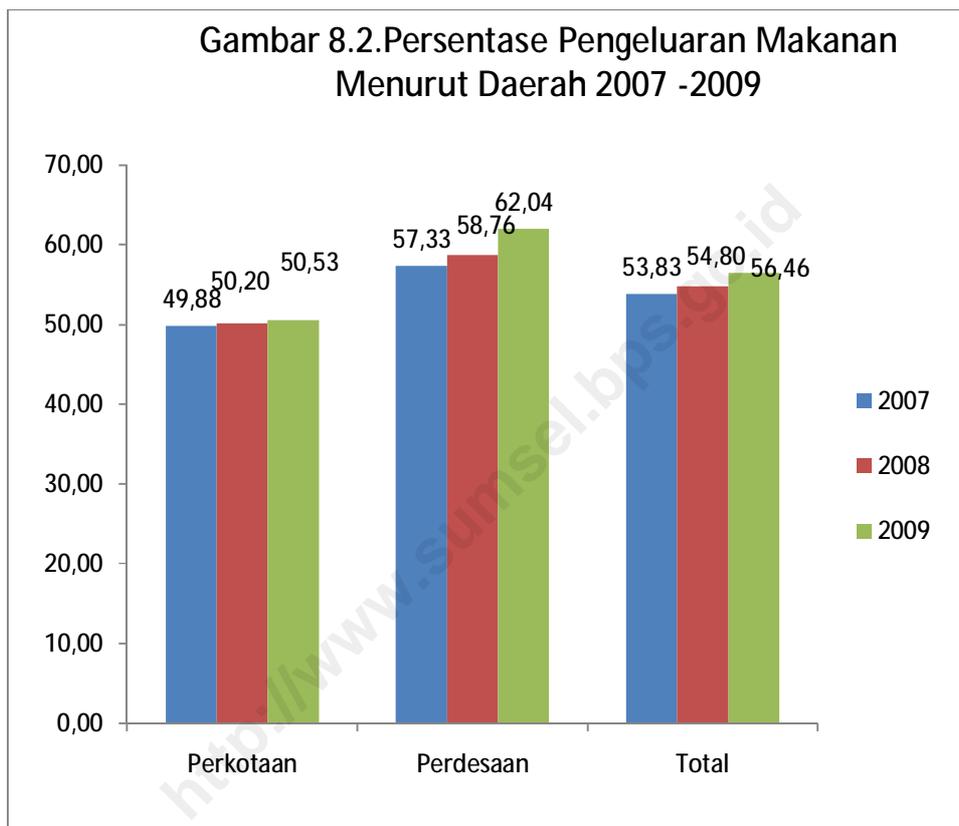
Catatan: Angka tahun 2008 merupakan angka revisi

Sumber: BPS Sumatera Selatan, dihitung dari Susenas Panel 2007, 2008 dan 2009

Berdasarkan Tabel 8.5. terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2009 lebih besar dari pada tahun 2008 dan 2007. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2007 terhitung 53,83 persen, naik menjadi 54,80 persen pada tahun 2008 dan kembali naik menjadi 56,46 pada tahun 2009. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2009 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2008 dan 2007. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan penduduk selama periode 2007 – 2009.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal (Gambar 8.2.), nampak perbedaan yang cukup signifikan antara penduduk perkotaan dan pedesaan dalam hal persentase pengeluaran makanan. Persentase pengeluaran makanan penduduk

pedesaan jauh di atas persentase pengeluaran makanan penduduk perkotaan. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan.



<http://www.sumsel.bps.go.id>

## BAB IX

### PERUMAHAN DAN SANITASI

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Arti fisik perumahan/pemukiman yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Data keadaan perumahan sangat penting terutama untuk menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumahtangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah kelayakan dan kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tingkat pendapatan dan aspek-aspek lain. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan di Sumatera Selatan, pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator perumahan dan pemukiman seperti kondisi fisik bangunan dan fasilitas tempat.

#### 9.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan sangat berperan sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat

tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal(perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Pada tahun 2009 tercatat sebesar 35,07 persen rumah tangga di Sumatera Selatan yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 10 m<sup>2</sup> per anggota rumah tangga. Dibandingkan tahun 2008 dan 2007, persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan luas kurang dari 10 m<sup>2</sup> justru mengalami penurunan (Tabel 9.1.)

Tabel 9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2007 – 2009

Kualitas Perumahan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m <sup>2</sup>	35,32	37,96	35,07
Lantai Bukan Tanah	88,82	89,14	90,95
Atap Layak	93,96	93,07	94,97
Dinding Permanen	97,57	96,97	97,32

Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

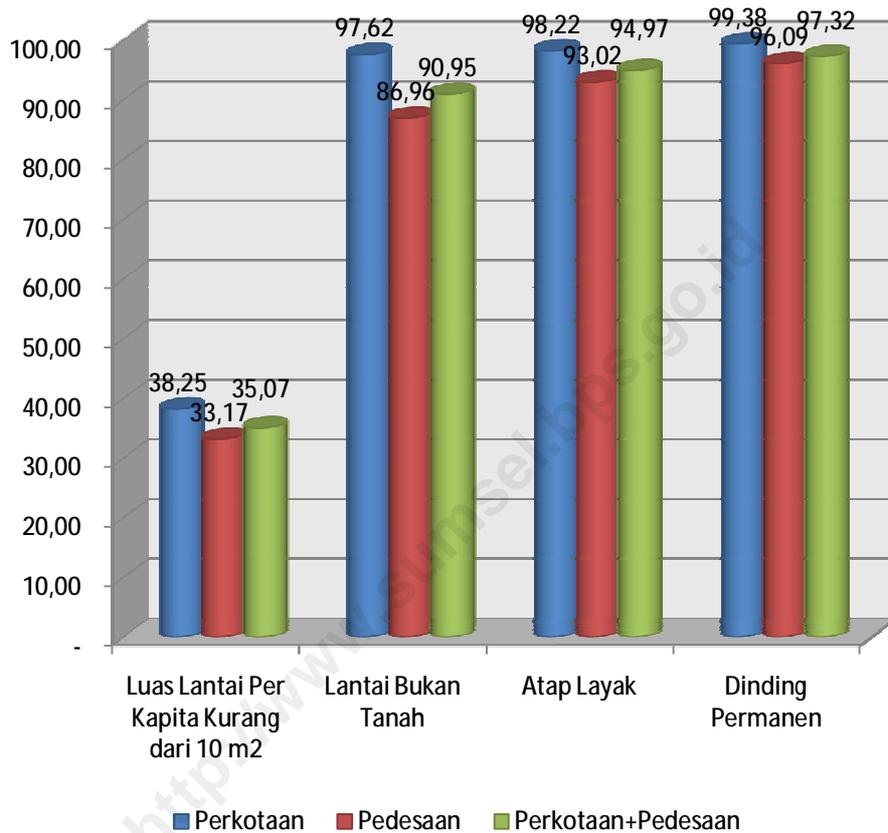
Selain dari luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis

lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Pada tahun 2007 tercatat 88,82 persen rumah tangga di Sumatera Selatan tidak menggunakan tanah sebagai lantai rumah. Angka ini meningkat menjadi 89,14 persen pada tahun 2008 dan kembali meningkat menjadi 90,95 persen pada tahun 2009. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun masih cukup banyak rumah tangga yang tinggal dalam rumah yang kurang sehat, tetapi ada perbaikan kondisi lantai rumah penduduk dari tahun ke tahun.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) tercatat sebesar 94,97 persen pada tahun 2009 atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007 maupun 2008. Sedangkan rumah tinggal dengan dinding permanen pada tahun 2007 tercatat sebesar 97,57 persen, sedikit menurun menjadi 97,32 pada tahun 2009.

Gambar 9.1. Persentase Rumahtangga Menurut Klasifikasi Daerah dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan



Tabel 9.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2009

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m <sup>2</sup>	Lantai Bukan Tanah	Atap Layak	Dinding Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komerling Ulu	27,19	95,83	99,80	99,21
(02) Ogan Komerling Ilir	29,71	90,83	88,02	94,86
(03) Muara Enim	36,66	95,25	95,27	97,92
(04) Lahat	38,88	92,67	100,00	94,88
(05) Musi Rawas	27,50	88,29	100,00	99,38
(06) Musi Banyuasin	42,98	82,63	94,47	99,44
(07) Banyuasin	33,96	84,64	88,66	98,45
(08) OKU Selatan	36,24	87,76	97,23	86,64
(09) OKU Timur	20,12	74,77	99,84	97,06
(10) Ogan Ilir	43,81	97,05	75,56	94,03
(11) Empat Lawang	34,12	97,12	99,76	96,87
(71) Palembang	42,19	98,83	98,83	99,74
(72) Prabumulih	31,52	99,20	99,47	99,21
(73) Pagar Alam	35,92	96,36	99,64	97,92
(74) Lubuk Linggau	39,44	97,69	99,69	98,37
Sumatera Selatan	35,07	90,95	94,97	97,32

Sumber: BPS; Susenas 2009

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2009 persentase rumahtangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> yang cukup besar (lebih dari 40 persen) terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, Musi Banyuasin dan Kota Palembang dan Kota Lubuklinggau. Jika ditinjau dari jenis lantai tanah persentase

terbesar terdapat di OKU Timur, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Musi Rawas; ditinjau dari jenis atap yang layak persentase terendah terdapat di Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin dan OKI; serta ditinjau dari jenis dinding permanen persentase terendah di Kabupaten OKU Selatan (Tabel 9.2).

## 9.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2009 tercatat sebesar 88,05 persen rumah tinggal di Sumatera Selatan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Angka penggunaan listrik ini meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2007 dan 2008. Namun demikian saat ini masih ada sekitar 11,95 persen rumahtangga yang belum menggunakan listrik sebagai penerangan utama.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2009 rumah tangga di Sumatera Selatan yang menggunakan air leding dan air dalam kemasan baru mencapai 28,90 persen. Namun demikian, pengguna air minum leding dan kemasan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008. Sedangkan rumah tangga pengguna air bersih secara keseluruhan yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, serta sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat

pembuangan limbah lebih dari 10 m, pada tahun 2009 tercatat sebesar 51,83 persen.

Tabel 9.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2007 – 2009

Kualitas Perumahan	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumber Penerangan Listrik	80,52	82,10	88,05
Air Minum Leding dan Kemasan	22,95	24,46	28,90
Air Bersih	73,95	46,45	51,83
Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	38,55	37,24	43,17

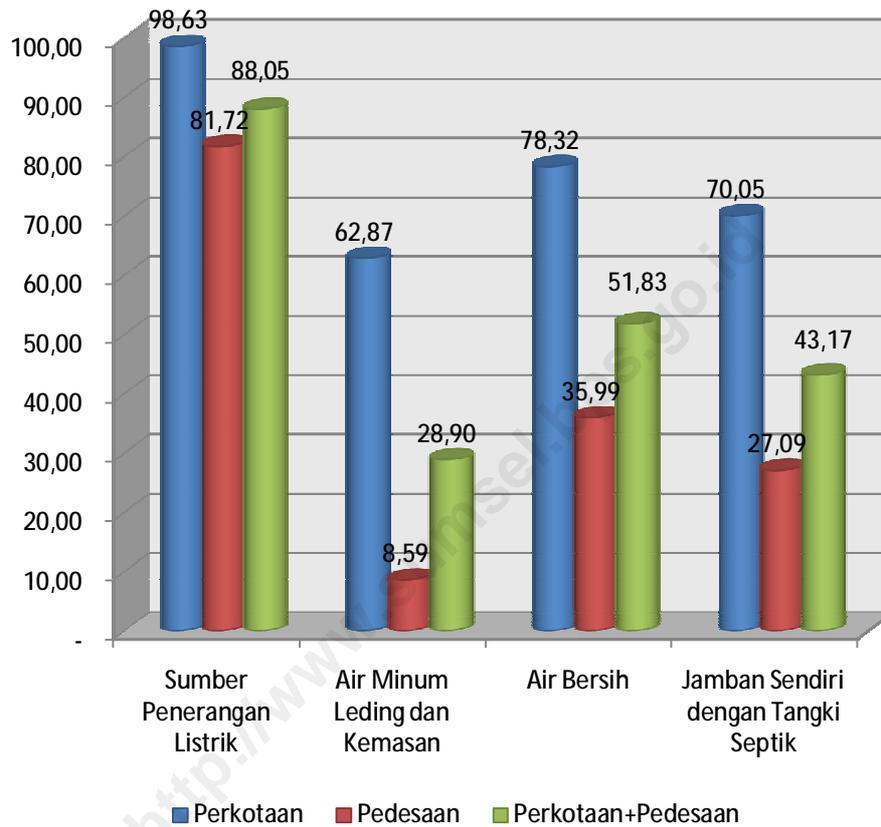
Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencernaan yang mungkin di timbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Dari tahun ke tahun rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat sebesar 38,55 persen rumah tangga di Sumatera Selatan yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 43,17 persen. Dengan demikian ada perbaikan fasilitas perumahan di Sumatera Selatan periode 2007 – 2009 menuju pada fasilitas yang sesuai dengan standar kesehatan.

Fasilitas rumah dilihat menurut kabupaten/kota seperti disajikan pada Tabel 9.4 di bawah, untuk penerangan listrik yang masih cukup rendah penggunaannya adalah di Kabupaten OKU Selatan dan Banyuasin. Penggunaan air leding dan kemasan kecuai di Kota Palembang umumnya masih cukup rendah khususnya di Empat Lawang, Musi Rawas, OKU Timur dan OKU Selatan. Demikian juga penggunaan air bersih secara keseluruhan rata-rata masih cukup rendah kecuai di Kota Palembang yang mencapai 94,40 persen. Sedangkan rumahtangga pengguna jamban sendiri dengan tangki septik juga umumnya kurang dari 50 persen, kecuai di Kota Palembang, Lubuklinggau, dan Prabumulih. Dengan demikian, berdasarkan data-data pada Tabel 9.4 tersebut diketahui bahwa penggunaan fasilitas rumah yang sesuai standar kesehatan di Sumatera Selatan ternyata masih relatif rendah terutama berkaitan dengan penggunaan air bersih dan penggunaan jamban sendiri menggunakan tangki septik.

Gambar 9.2. Persentase Rumahtangga Menurut Klasifikasi Daerah dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan



Tabel 9.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2009

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Listrik	Air Minum Leding dan Kemasan	Air Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	93,06	34,30	62,78	45,31
(02) Ogan Komering Ilir	84,94	9,63	39,84	35,29
(03) Muara Enim	90,84	22,91	46,16	41,67
(04) Lahat	89,30	10,99	38,31	32,70
(05) Musi Rawas	82,03	2,81	40,62	26,56
(06) Musi Banyuasin	87,29	27,05	43,17	30,89
(07) Banyuasin	78,69	19,67	31,10	37,80
(08) OKU Selatan	72,13	6,94	29,17	25,59
(09) OKU Timur	86,04	4,46	58,46	24,41
(10) Ogan Ilir	83,51	21,17	40,11	44,37
(11) Empat Lawang	82,45	3,12	15,86	27,88
(71) Palembang	99,48	86,59	94,40	74,09
(72) Prabumulih	98,40	27,28	48,47	54,55
(73) Pagar Alam	97,57	14,62	42,88	47,01
(74) Lubuk Linggau	96,04	30,24	59,91	75,39
Sumatera Selatan	88,05	28,90	51,83	43,17

Sumber: BPS; Susenas 2009

## BAB X

### ASPEK SOSIAL LAINNYA

Berbicara mengenai aspek sosial memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain aspek-aspek sosial yang telah diuraikan di muka, pada bagian ini akan dijelaskan aspek sosial lainnya mencakup akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta kondisi sosial ekonomi rumahtangga lainnya yang berkaitan dengan partisipasi rumahtangga terhadap program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta lainnya.

#### 10.1. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adanya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Selain sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi, adanya akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumahtangga. Beberapa indikator akses rumahtangga terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dikemukakan di sini meliputi kepemilikan telepon rumah, kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer, akses internet di rumah serta akses anggota rumahtangga terhadap internet di luar rumah. Data-data tersebut disajikan pada Tabel 10.1 di bawah ini.

Kepemilikan telepon rumah masih relatif kecil, pada tahun 2009 hanya 8,36 persen rumahtangga yang memiliki telepon rumah. Angka kepemilikan telepon rumah ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2007 yang besarnya 9,05 persen.

Kebutuhan akan informasi di rumahtangga sebagian besar ternyata dipenuhi melalui telepon seluler. Angka kepemilikan telepon seluler jauh lebih besar dibandingkan

kepemilikan telepon rumah. Pada tahun 2009 persentase rumahtangga yang memiliki minimal 1 telepon seluler mencapai 58,91 persen. Dibandingkan tahun 2007, angka kepemilikan telepon seluler juga meningkat cukup besar, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat pesat akhir-akhir ini.

Tabel 10.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2007 – 2009

Persentase Rumahtangga	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Memiliki Telepon Rumah	9,05	8,25	8,36
Ada ART Memiliki Telepon Seluler	32,88	51,70	58,91
Memiliki Komputer	4,61	6,96	9,08
Akses Internet di Rumah	0,91	3,57	1,76
Ada ART Akses Internet di Luar Rumah	3,09	5,42	9,18

Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

Berbeda dengan kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer di rumahtangga ternyata masih sangat kecil. Pada tahun 2009 persentase rumahtangga yang memiliki komputer hanya sebesar 9,08 persen. Hal ini dinilai wajar karena harga komputer lebih tinggi dibandingkan harga telepon seluler. Di samping itu tingkat kebutuhan rumahtangga terhadap komputer dinilai lebih rendah dibandingkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap telepon seluler. Dibandingkan tahun 2008 dan 2007, angka kepemilikan komputer juga meningkat dari 4,61 persen pada tahun 2007 dan 6,96 persen tahun 2008.

Kecilnya angka kepemilikan komputer juga berdampak pada kecilnya akses rumahtangga terhadap internet di rumah. Pada tahun 2009 persentase rumahtangga yang mempunyai akses terhadap internet di rumah hanya 1,76 persen. Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun 2007, tetapi turun dibandingkan tahun 2008. Sebagian kebutuhan anggota rumahtangga terhadap informasi melalui internet dipenuhi di luar telepon rumah seperti melalui telepon seluler, warnet, kantor, sekolah atau tempat lainnya di luar rumah. Pada tahun 2009, persentase rumahtangga yang anggota rumahtangganya memiliki akses internet di luar rumah termasuk melalui telepon seluler mencapai 9,18 persen, meningkat dibandingkan tahun 2007 yang besarnya 3,09 persen dan 2008 yang besarnya 5,42 persen.

Berdasarkan indikator akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di atas, diketahui bahwa kelima indikator yang dikemukakan angkanya mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir (2007 – 2009). Meskipun angka-angka tersebut dinilai masih relatif kecil, adanya peningkatan angka-angka tersebut pada periode 2007 – 2009 jelas merupakan salah satu indikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan pada periode yang sama.

Dilihat per kabupaten/kota, secara keseluruhan terlihat bahwa akses teknologi informasi sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih sangat rendah. Akses yang paling rendah khususnya dijumpai di Kabupaten Empat Lawang, OKU Selatan, dan Musi Rawas (Tabel 10.2).

Tabel 10.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2009

Kabupaten/Kota	Memiliki Telepon Rumah	Ada ART Memiliki Telepon Seluler	Memiliki Komputer	Akses Internet di Rumah	Ada ART Akses Internet di Luar Rumah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	12,49	68,35	15,67	3,17	16,06
(02) Ogan Komering Ilir	4,55	51,20	2,30	0,17	1,25
(03) Muara Enim	4,80	51,39	1,80	0,15	1,19
(04) Lahat	12,73	58,46	11,13	0,14	6,73
(05) Musi Rawas	1,88	42,03	2,81	0,31	1,87
(06) Musi Banyuasin	3,60	59,35	10,64	0,31	6,02
(07) Banyuasin	3,39	57,12	3,65	0,21	4,91
(08) OKU Selatan	1,00	40,30	2,62	0,51	2,57
(09) OKU Timur	2,12	50,27	3,68	0,48	2,71
(10) Ogan Ilir	4,60	53,44	5,93	0,61	3,74
(11) Empat Lawang	4,08	31,97	4,81	0,24	1,20
(71) Palembang	22,01	83,33	22,01	6,64	28,65
(72) Prabumulih	18,68	80,14	29,11	4,65	20,00
(73) Pagar Alam	9,52	70,31	11,21	3,09	11,49
(74) Lubuk Linggau	14,72	62,41	16,08	1,90	14,77
Sumatera Selatan	8,36	58,91	9,08	1,76	9,18

Sumber: BPS; Susenas 2009

## 10.2. Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya

Kondisi sosial ekonomi rumahtangga dapat dilihat dari partisipasi rumahtangga atau anggota rumahtangga terhadap berbagai program bantuan yang diberikan oleh

pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya. Beberapa jenis bantuan yang umumnya ditujukan kepada rumahtangga miskin misalnya pelayanan kesehatan gratis, beras murah atau raskin dan bantuan kredit usaha. Selain itu, untuk membantu ekonomi rumahtangga tidak jarang satu atau beberapa anggota rumahtangga dikirim untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Tabel 10.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2007 – 2009

Persentase Rumahtangga	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)
Ada ART Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis 6 Bulan Terakhir	11,68	9,67	13,51
Pernah Membeli Beras Murah/Raskin 3 Bulan Terakhir*)	43,20	45,43	47,72
Pernah Mendapatkan Kredit Usaha Setahun Terakhir	1,97	3,69	4,61

Sumber: BPS; Susenas 2007, 2008 dan 2009

Catatan:

\*) Angka tahun 2007 keadaan 6 bulan terakhir

Pada tahun 2009 diperkirakan 13,51 persen rumahtangga yang pernah mendapat pelayanan kesehatan gratis periode 6 bulan sebelum survei dilakukan. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2007 dan 2008. Sementara itu persentase rumahtangga yang membeli beras murah atau raskin dalam 3 bulan terakhir sebesar 47,72 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin angka ini sangat besar, sehingga diduga rumahtangga yang mendapatkan beras murah atau raskin tidak semuanya

merupakan rumahtangga miskin. Khusus untuk beras murah misalnya melalui Operasi Pasar memang tidak khusus ditujukan untuk rumahtangga miskin.

Beberapa tahun terakhir pemerintah banyak menggulirkan program bantuan kredit usaha kepada rumahtangga miskin misalnya melalui Program Pengembangan Kecamatan, Program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) maupun program pemerintah lainnya. Namun demikian, pada tahun 2009 rumahtangga yang mendapat bantuan kredit selama setahun terakhir sebelum pencacahan baru mencapai 4,61 persen. Ini berarti baru sebagian kecil rumahtangga miskin yang terjangkau oleh program bantuan kredit, padahal persentase penduduk miskin pada tahun 2009 di Sumatera Selatan mencapai angka 16,28 persen. Namun demikian, angka tahun 2009 sedikit mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2007 dan 2008 (Tabel 10.3).

Tabel 10.4 menyajikan indikator sosial ekonomi rumahtangga lainnya menurut kabupaten/kota. Persentase rumahtangga yang menerima pelayanan kesehatan gratis tertinggi dijumpai Ogan Ilir dan Palembang, sedangkan raskin tertinggi terdapat di Ogan Ilir dan OKI. Angka-angka ini sama sekali belum menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan di daerah tersebut karena disinyalir masih ada penduduk tidak miskin yang menerima pelayanan kesehatan gratis maupun raskin tersebut.

Tabel 10.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2009

Kabupaten/Kota	Ada ART Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis 6 Bulan Terakhir	Pernah Membeli Beras Murah/Raskin 3 Bulan Terakhir	Pernah Mendapatkan Kredit Usaha Setahun Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	15,37	38,11	11,82
(02) Ogan Komering Ilir	16,36	67,05	6,39
(03) Muara Enim	14,97	39,15	3,77
(04) Lahat	15,99	39,54	3,02
(05) Musi Rawas	10,47	43,12	3,28
(06) Musi Banyuasin	15,52	45,68	9,49
(07) Banyuasin	4,53	59,30	2,68
(08) OKU Selatan	10,28	54,10	1,95
(09) OKU Timur	7,06	37,69	4,95
(10) Ogan Ilir	21,95	69,92	6,46
(11) Empat Lawang	8,66	39,66	1,44
(71) Palembang	18,49	45,18	3,13
(72) Prabumulih	13,82	23,97	1,59
(73) Pagar Alam	9,93	28,30	3,64
(74) Lubuk Linggau	13,66	33,00	8,86
Sumatera Selatan	13,51	47,72	4,61

Sumber: BPS; Susenas 2009

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro 1694/1131 Palembang 30129  
Telp. (0711) 351665 Fax (0711) 353174